



KATA PENGANTAR

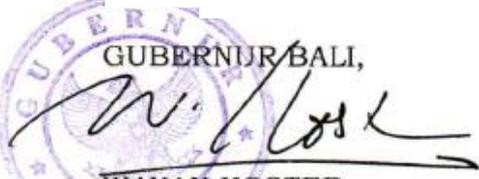
Om Swastiastu,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa- Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha Nya, Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018.

LKjIP Provinsi Bali ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LKjIP Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	25
C. Indikator Makro Tahun 2018	26
D. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Evaluasi Kinerja	33
B. Analisis Pencapaian Kinerja	36
BAB IV PENUTUP	145
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Pengukuran Kinerja 2018	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali.	10
2. Tabel 2.2 : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.	26
3. Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018.	29
4. Tabel 3.1 : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Bali Tahun 2014 s.d 2018	38
5. Tabel 3.1.1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2017-Maret 2018	46
6. Tabel 3.1.2 : Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, September 2017 Maret 2018	48
7. Tabel 3.1.3 : Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk Desember 2017, November 2018 dan Desember 2018	50
8. Tabel 3.1.4 : Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Desember 2017, November 2018 dan Desember 2018.	51
9. Tabel 3.1.5 : Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Januari-Desember 2018	52



10.	Tabel	3.1.6	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Komponen, 2010-2017	55
11.	Tabel	3.1.7	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017.	57
12.	Tabel	3.2.	:	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Iptek dan Daya Saing SDM serta Kesehatan Masyarakat.	60
13.	Tabel	3.2.1	:	Capaian Kinerja Program Melek Huruf Tahun 2018	61
14.	Tabel	3.2.2	:	Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2017	70
15.	Tabel	3.2.3	:	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2017-2018	72
16.	Tabel	3.2.4	:	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018	74
17.	Tabel	3.2.5	:	Target dan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang lulus Sertifikasi Kompetensi.	75
18.	Tabel	3.2.6	:	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya	79
19.	Tabel	3.2.7	:	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	83
20.	Tabel	3.2.8	:	Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali Tahun 2018	84



21.	Tabel	3.2.9	: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Dan Eksternal yang Ditindaklanjuti.	88
22.	Tabel	3.2.10	: Perkembangan Pedapatan Lainnya Provinsi Bali 2014 s.d 2018 Terwujudnya Pengaturan Tata Ruang Dan	90
23.	Tabel	3.2.11	: Terwujudnya Pengaturan Tata Ruang Dan Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Alam	86
24.	Tabel	3.2.12	: Terwujudnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Toleransi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama Serta Sistem Keamanan Yang Berstandar Internasional.	102
25.	Tabel	3.2.13	: Target dan Capaian Kinerja 2018	103
26.	Tabel	3.2.14	: Data Pelanggaran Perda Tahun 2018	105
27.	Tabel	3.2.15	: Nilai ASFR dan TFR Kabupaten/ Kota, Provinsi Bali Tahun 2010	106
28.	Tabel	3.2.16	: Berkembangnya Kepariwisata Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan.	108
29.	Tabel	3.2.17	: Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk Denpasar 2017, November 2018 dan Desember 2018	109
30.	Tabel	3.2.18	: Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Desember 2017, November 2018 dan	110



Desember 2018				
31.	Tabel	3.2.19	: Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Januari-Desember 2018	111
32.	Tabel	3.2.20	: TPK Pada Hotel Berbintang di Bali Menurut Kabupaten/Kota November 2018 dan Desember 2018.	112
33.	Tabel	3.2.21	: TPK Menurut Klasifikasi Bintang di Bali November 2018 dan Desember 2018	112
34.	Tabel	3.2.22	: Rata-rata Lama Menginap Tamu asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di Bali November 2018 dan Desember 2018.	113
35.	Tabel	3.2.23	: Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di Bali Menurut Kabupaten/Kota, November 2018 dan Desember 2018.	114
36.	Tabel	3.2.24	: Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali)	116
37.	Tabel	3.2.25	: Indeks Tukar Petani Provinsi Bali dan Perubahannya Menurut Subsektor November 2018-Desember 2018 (2012=100)	120
39.	Tabel	3.2.26	: Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional serta Pesentase Perubahannya, November 2018-Desember 2018 (2012=100)	112



40.	Tabel	3.2.27	: Indeks Tukar Usaha Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, November 2018-Desember 2018 (2012=2010)	122
41.	Tabel	3.2.28	: Berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran	123
42.	Tabel	3.2.29	: Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2017-2018	127
43.	Tabel	3.2.30	: Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018	129
44.	Tabel	3.2.31	: Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	130
45.	Tabel	3.2.32	: Tabel 3.2.32 Ekspor Provinsi Bali Menurut Negara Tujuan Keadaan bulan September 2017, Agustus 2018 dan September 2018	140
46.	Tabel	3.2.33	: Ekspor Provinsi Bali Menurut Komoditas Utama Keadaan bulan September 2017, Agustus 2018 dan September 2018	142

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik		Halaman
1. Grafik	3.1 : Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Tahunan	39
2. Grafik	3.2 : Pangsa Ekonomi Bali terhadap KTI dan Nasional Tahun 2018.	40
3. Grafik	3.3 : Inflasi Kota di Provinsi Bali Tahun 2018	42
4. Grafik	3.4 : Perkembangan Kemiskinan di Bali Maret 2014-Maret 2018	47
5. Grafik	3.5 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 2010-2017	54
6. Grafik	3.6 : IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota 2017	56
7. Grafik	3.7 : Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Bali Tahun 2014 s.d 2018	62
8. Grafik	3.8 : Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2011-2017.	65
9. Grafik	3.9 : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Bali, 2010-2017 (Tahun).	69
10. Grafik	3.10 : Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Bali Tahun 2010 s.d. 2018	85
11. Grafik	3.11 : Perkembangan <i>Gini Ratio</i> di Provinsi Bali September 2014-September 2018	137



12.	Grafik	3.12	:	10 Negara Tujuan Utama Ekspor Provinsi Bali Keadaan Bulan September 2019	141
-----	--------	------	---	--	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 3.1 : Perekonomian Provinsi Bali .	38
2. Gambar 3.2 : Inflasi Bali.	42
3. Gambar 3.3 : Kunjungan Gubernur Bali Ke Penduduk Miskin.	44
4. Gambar 3.4 : SMA dan SMK Bali Mandara.	53
5. Gambar 3.5 : Job Fair.	126



RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas Pembangunan Provinsi Bali yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 .

Uraian Laporan Kinerja ini menyajikan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Indikator kinerja, yang didukung oleh Program, Kegiatan, Anggaran, Capaian, masalah dan upaya mengatasi masalah agar capaian program pada tahun mendatang menjadi lebih baik.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Bali disamping melaksanakan program-program yang konvensional pada semua bidang/sector, juga melaksanakan terobosan-terobosan baru (*inovation breakthrough*) pada beberapa bidang-bidang yang strategis sebagai upaya akselerasi (percepatan) pencapaian tujuan.

Program Prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2017 meliputi :

1. Bidang Kesehatan :

Dilaksanakan program pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bali yang belum memiliki Asuransi Kesehatan yang disebut Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Program ini memberi pelayanan kesehatan gratis dengan standar pelayanan kelas III. Program ini secara signifikan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti



menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan lain-lain.

2. Bidang Penanggulangan Kemiskinan :

Dilaksanakan program pembangunan rumah layak huni bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang disebut dengan program Bedah Rumah. Program ini merupakan upaya percepatan mengurangi jumlah RTM di Provinsi Bali.

3. Bidang Pendidikan :

Dilaksanakan program pembelajaran berbasis *Information Teknologi (IT)*, *E-Learning* pada semua jenjang pendidikan. Juga dilaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun dimana segala konsekuensi biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dilaksanakan Pembangunan Sekolah Unggulan (SMA Negeri Bali Mandara) yang berbasis pada Sekolah Bertaraf Internasional) dalam proses belajar mengajarnya menggunakan sistem dua bahasa (bilingual) yaitu Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali memberikan Bea Siswa kepada Siswa SMK miskin dan berprestasi masing-masing sebesar Rp. 22.000.000.

4. Bidang Pertanian :

Dilaksanakan program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI). Program ini untuk mempercepat peningkatan pendapatan petani. Program ini mengintegrasikan antara Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (darat) serta mengadopsi teknologi pengelolaan limbah seperti Biogas dan lain-lain yang dilaksanakan Kelompok-kelompok Tani. Pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi dalam pembentukan kelompok, permodalan, adopsi teknologi dan bimbingan/pelatihan. Kinerja program ini meningkatkan pendapatan petani secara signifikan dan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat.

5. Bidang Penguatan Modal UMKM :

Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan penghargaan koperasi terbaik di Indonesia di Tahun 2016, ini dengan angka prosentase koperasi berkualitas di atas 78 persen, sehingga predikat Provinsi Koperasi tercapai. Dan di tahun 2017 ini sebanyak 90 persen di antaranya aktif dan hanya 10 persen yang tidak aktif. Capaian ini melebihi rata-rata tingkat nasional yang mencapai 25 persen tidak aktif. Bahwa dari jumlah itu, 150 koperasi di antaranya



merupakan binaan pemerintah provinsi yang juga semuanya berkinerja aktif. Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan kredit tanpa agunan untuk memperkuat UMKM melalui pembentukan PT. Jamkrida Bali Mandara, yang beroperasi sejak tahun 2011 s.d 2017, PT. Jamkrida Bali Mandara juga memperoleh penghargaan TOP BUMD Asuransi & Jamkrida 2017 dan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika sebagai TOP Pembina BUMD 2017. Pada tahun 2016 PT. Jamkrida Bali Mandara telah menjalin kerjasama dalam bidang penjaminan dengan 260 (dua ratus enam puluh) partner usaha.

6. Bidang Lingkungan Hidup :

Dilaksanakan program "*Bali Clean and Green*" dan "*Bali Beach Clean Up*" yang tujuannya mempercepat terwujudnya Bali yang bersih dan hijau. Program ini mendapat respon positif dan dukungan semua Kabupaten/Kota, Industri/pengusaha dan pelaku pariwisata karena program ini sangat penting bagi Bali sebagai destinasi wisata. Program ini signifikan untuk mengurangi laju deforestasi di Bali.

7. Bidang Keamanan :

Dilaksanakan program pembangunan sistem keamanan berstandar internasional melalui pembangunan sarana-sarana monitor keamanan/deteksi dini yaitu *Circuit Close Television* (CCTV) pada titik-titik strategis. Program ini sangat penting bagi Bali sebagai destinasi wisata yang sensitif terhadap isu-isu keamanan. Dalam rangka penanggulangan bencana, juga telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dengan teknologi *Early Warning System* yang beroperasi 24 Jam penuh.

8. Bidang Tata Kelola Pemerintahan :

Dilaksanakan program Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*). Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2010 untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi. E-Proc ini dapat mengurangi praktek-praktek tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



9. Bidang Pelayanan Publik :

Dilaksanakan program pelayanan publik dengan sistem *One Stop Service* (OSS) yaitu melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Bali. 50 jenis pelayanan perijinan dilaksanakan melalui OSS ini. Kinerja pelayanan publik saat ini cukup baik antara lain dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 83 (sangat baik). Pada tahun 2010 OSS ini juga mendapat penghargaan PTSP Award dari BKPM – RI. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menerapkan Manajemen Mutu berstandar Internasional (ISO) pada Unit-unit Pelayanan Publik secara bertahap. Tahun 2011 sudah 10 Unit Pelayanan Publik menerapkan ISO 9001:2008. Pada tahun 2010, 3 (tiga) Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Bali mendapat Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) tingkat Nasional. Semua Unit Pelayanan Publik (23 Unit) telah menyelesaikan penyusunan Standar Operating Procedure (SOP).

10. Bidang Keuangan dan Aset :

Dilaksanakan program validasi aset untuk mewujudkan manajemen aset yang baik dan akuntabel. Hasil Audit laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Bali mendapat Opini "*Disclaimer*". Melalui program validasi aset, maka opini laporan keuangan Tahun Anggaran tahun 2009 yang dilaksanakan tahun 2010 meningkat menjadi "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)". Pada tahun 2011 dapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)". Selanjutnya pada tahun 2012 mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)". Begitu juga halnya tahun 2013 masih memperoleh predikat WDP, dan tahun 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Bali tetap bisa mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali tetap bisa mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja seluruh program dan kegiatan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebagaimana tersaji dalam Laporan Kinerja ini, hampir seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) memperlihatkan capaian kinerja yang baik, bahkan beberapa indikator-



indikator pendidikan dan kesehatan sudah berada di atas rata-rata Nasional. Dengan demikian secara umum kinerja Pemerintah Provinsi Bali, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sudah termasuk kategori baik. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi beberapa variabel seperti kepemimpinan yang visioner, komitmen membangun pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel, serta sinergi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Provinsi Bali. Kekurangan, kelemahan, capaian yang belum optimal menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Bali pada masa mendatang masih menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perhatian pemerintah, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan



lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Bali beserta Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2013-2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen



pelaksanaan Perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun anggaran dan RPJMD tahun 2013-2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018 adalah sebagai Laporan pencapaian sasaran Strategis Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan pencapaian Sasaran Strategis berupa analisis hasil Pengukuran pencapaian sasaran serta rangkuman hasil kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana telah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

LAKIP Provinsi Bali disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018 adalah :

1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018;
2. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018;

Sepuluh Prioritas Pembangunan

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan maka prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018 adalah :

- Prioritas 1 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- Prioritas 2 : Pendidikan
- Prioritas 3 : Kesehatan
- Prioritas 4 : Infrastruktur Wilayah
- Prioritas 5 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Prioritas 6 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
- Prioritas 7 : Pertanian dan Ketahanan Pangan



- Prioritas 8 : Industri Kecil, Pariwisata, Investasi, UMKM dan Koperasi
- Prioritas 9 : Ketentraman dan Ketertiban, Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional
- Prioritas 10 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Provinsi Bali Tahun 2018 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi,



Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi

Sejalan dengan perkembangan dunia yang semakin mengglobal, Provinsi Bali pun menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat kompleks. Bali kini dihadapkan dengan beragam persoalan dengan berbagai dimensinya seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan, infrastruktur, tingkat kesejahteraan petani, lingkungan, sanitasi, penyakit menular dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, untuk membangun Bali yang lebih baik di masa mendatang pada RPJMD 2013–2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Bali, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali adalah **”Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”**. Dengan memperhatikan Visi tersebut serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Bali tetap eksis dan survive dalam menghadapi gempuran pengaruh global sebagai akibat dari perkembangan pariwisata di Bali. Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini.

Bali Maju adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya Dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus



tetap “Metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius.

Bali yang Maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai Agama Hindu (Bali) serta Adat Istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka.

Bali Aman adalah Bali yang “ Dabdab” teratur *sekala niskala*. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep **Tri Hita Karana**. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkhisme dan virus *non traditional threat* lainnya yang mewarnai jaman Kali.

Bali Damai adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi “Tis” dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana “*briyag-briyug, pakedek pakenyem*”. Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan.

Bali Sejahtera adalah Bali yang Sukerta *Sekala Niskala*, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan, dan kedamaian.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.



Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk menuju **Bali Mandara** yaitu **Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera**, maka rumusan Misi Provinsi Bali dalam pencapaian Visi Bali ditetapkan dalam misi pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.
- 2) Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman.
- 3) Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin.

3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 seperti tabel di bawah ini.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern	Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A
				Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B
				Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
			Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Angka Melek Huruf
				Angka rata-rata lama sekolah
				Index Pembangunan Manusia (IPM)



1	2	3	4	5
			Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumber daya manusia	Angka Kelulusan SD/MI
				Angka Kelulusan SMP/MTs
				Angka Kelulusan SMA/SMK/MA
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan (%) JKBM pada penduduk sasaran
				Angka usia harapan hidup
				Balita gizi buruk
				Jumlah ruang rawat inap kelas III



1	2	3	4	5	
				Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari balita gizi buruk yang dijumpai	
				Persen KLB (Kejadian Luar Biasa) yang tertangani < 24 jam	
				Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan	Proporsi anggota DPRD perempuan
					Partisipasi angkatan kerja perempuan
					Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
				Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	
Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat				Persentase subak yang dibina	



1	2	3	4	5
				Persentase desa pekraman yang dibina
				Persentase kerjasama pembinaan dengan banjar
				Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Bali
				Persentase kerjasama dengan majelis desa pekraman



1	2	3	4	5
				Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Bali
			Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
				Jumlah pembinaan politik daerah
			Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Bali
				Jumlah Unit Pelayanan yang telah menerapkan prinsip pelayanan prima



1	2	3	4	5
2	Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman	Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional	Terwujudnya pengaturan tata ruang	Perda Rencana Tata Ruang Provinsi
				Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
				Perda Zonasi pemanfaatan ruang
			Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)
				Persentase current user pemakai kontrasepsi modern
				Persentase penanganan sampah



1	2	3	4	5
			Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku	Pencemaran status mutu air sungai utama
				Persentase Penduduk berakses air minum yang terlindungi
				Jumlah sumber daya lahan dan air yang dilindungi



1	2	3	4	5
			Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Jumlah pengawasan pelanggaran pemanfaatan ruang Jumlah lokasi penyelenggaraan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, flora dan fauna



1	2	3	4	5
				Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi PB
			Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Jumlah pelaksanaan Operasi Gabungan
				Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pended)
			Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan konflik adat



1	2	3	4	5
			Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama	Persentase penurunan jumlah demo
3	Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin	Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumahtangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)
				Pengembangan daerah tujuan wisata
			Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)
				Nilai Tukar Petani (NPT)



1	2	3	4	5
				Pertumbuhan PDRB
			Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh	Jumlah UMKM (tumbuhnya UMKM baru sebanyak 2500 buah dalam lima tahun)
				PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th)
				Persentase peningkatan akurasi data investadi PMA dan PMDN serta kemitrausahaan antara pengusaha sedang dan besar dengan UMKM
			Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Persentase peningkatan minat investor berinvestasi di Bali



1	2	3	4	5
				Jumlah nasabah jamkrida
			Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi (sebanyak 750 buah selama lima tahun)
				Persentase peningkatan nilai ekspor per tahun
			Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Jumlah koperasi berkualitas melalui pemeringkatan oleh lembaga independen sebanyak 500 buah selama lima tahun
			Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Persentase penduduk miskin



1	2	3	4	5
				Tingkat pengangguran terbuka
				Persentase/jumlah rumah yang sudah dibedah pertahun
			Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Persentase pelayanan air minum
				Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi baik
				Indeks Gini Ratio
				Peningkatan Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita (Jiwa)



1	2	3	4	5
			Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB
				Nilai Tukar Petani (NPT)
				Jumlah Binaan Gapoktan Simantri
			Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), dan koordinasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan di 9 Kab/Kota
				Jumlah Binaan Gapoktan Simantri



			Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian	Produksi komoditas andalan a.l : kopi arabika, kopi robusta, kakao, jambu mente, cengkeh, kelapa, tembakau (ton)
				Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan peningkatan pertanian dan kelautan dalam 1 tahun
			Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Produksi Perikanan (ton)
				Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)
			Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka

Sumber : RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018.



B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Bali, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem pembiayaan *cost sharing* dengan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara konsisten.
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pengawasan program-program pembangunan.
4. Mengembangkan instrumen regulasi yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
5. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
6. Melaksanakan advokasi ke pemerintah pusat untuk kemungkinan mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



C. Indikator Makro Tahun 2018

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Provinsi Bali Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2014 s.d 2018 :

No.	Indikator Makro	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,73	6.03	6,32	5,57	6,35
2.	Inflasi (%)	8,43	2,75	3,18	2,69	3,13
3.	Penduduk Miskin (jiwa)	195,95	196,71	178,18	176,48	171,76
4.	Prosentase Penduduk Miskin (%)	4,76	5,25	4,15	4,14	4,01
5.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	3,7 juta orang	4,0 juta orang	4,92 juta orang	5,69 juta orang	5,57 juta orang
6.	IPM	72,48	73,27	73,65	74,30	n/a
7.	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	2,4 T	2,8 T	2.9 T	2,9 T	

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali (data diolah)

D. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada umumnya sering disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2018, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2018 secara rinci disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah). Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek, fokus, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan



pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2013-2018, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Provinsi Bali berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 10 (sepuluh) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali (terlampir), yaitu :

- Prioritas 1 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan pengangguran
- Prioritas 2 : Pendidikan
- Prioritas 3 : Kesehatan
- Prioritas 4 : Infrastruktur Wilayah
- Prioritas 5 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Prioritas 6 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
- Prioritas 7 : Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Prioritas 8 : Industri Kecil, Pariwisata, Investasi, UMKM dan Koperasi
- Prioritas 9 : Ketentraman dan Ketertiban, Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional
- Prioritas 10 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama,



sasaran yang hendak dicapai dengan target indicator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018

NO.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, lptek dan daya saing SDM serta kesehatan masyarakat	1.	Angka Melek Huruf	90,42%
		2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,11%
		3.	Index Pembangunan Manusia (IPM)	74,47%
		4.	Angka usia harapan hidup	71,51%
		5.	Tingkat Pengangguran terbuka	2,2%
		6.	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi Kompetensi	170 Orang
2	Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya	1.	Jumlah Penciptaan Seni Kreasi Baru /Eksperimental	70 buah



1	2	3	4	5
3	Terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance)	1.	Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali	76
		2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	95%
		3.	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100%
4	Terwujudnya pengaturan tata ruang dan meningkatkan pelestarian lingkungan alam	1.	Persentase ruang terbuka hijau per luas wilayah Kabupaten/Kota	21%
		2.	Status pencemaran baku mutu air	12,25%
		3.	Persentase penurunan emisi GRK	2%
5	Terwujudnya pengendalian pertumbuhan penduduk, toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta sistem keamanan yang berstandar internasional	1.	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	515
		2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,0
6	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	1.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	4.400.000



1	2	3	4	5
7	Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	119,27
		2.	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	11,6
8	Berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran	1.	Persentase penduduk miskin	2,8
		2.	Tingkat pengangguran terbuka	2,1
9	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	1.	Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi baik	85,54
		2.	Persentase Pelayanan air minum	85
10	Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio	0,360
		2.	Jumlah Pertumbuhan UMKM	500 buah
		3.	Jumlah Koperasi Berprestasi	100 buah
		4.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	34,86
		5.	Nilai Ekspor	2,22



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Pelaporan Kinerja Provinsi Bali tahun 2018 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2018.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penetapan target kinerja atas program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: *input*, *output*, dan *outcome*. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 disetujui dan ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018.



A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input*, *output*, maupun *outcome*.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Bali, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, akan berusaha dilakukan, hal ini terkendala dari keterbatasan data yang dimiliki. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian *output* dengan capaian *input*. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar



efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran secara umum adalah termasuk kategori efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang belum efisien, ketidakefisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan antara lain:

- Kelemahan dalam penetapan target pada indikator output, yang terlalu tinggi.
- Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun realisasi fisik kegiatan masih masih kurang dari yang ditargetkan.
- Kegiatan tidak optimal terealisasi karena pengesahan DPA perubahan baru turun pada bulan Nopember 2018.
- Pembatalan pembangunan fisik.
- Gagal tender dan tender ulang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang belum efisien ini, akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, sehingga kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih efisien, antara lain :

- Percepatan proses pengadaan barang/jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- Menyusun rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2018 baik itu bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan yang terintegrasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun Anggaran 2018.
- Mencermati kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun 2018, bila terdapat kesalahan baik substansi kegiatan maupun kode rekening agar segera direvisi.



2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(a) Efektivitas individual kegiatan;

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(b) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1) Kegiatan Yang Efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome* minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2) Kegiatan Yang Kurang Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator *outcome*-nya di bawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung. Bagi SDM yang tidak



mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/ketrampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Pemerintah Provinsi Bali memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab kegiatan.

2.3) Kegiatan Yang Belum Dapat Diukur Efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja outcome-nya. Selama tahun 2018, tidak terdapat terdapat kegiatan yang termasuk di dalam katagori ini.

Jadi tidak terdapat hambatan dalam penentuan indikator kinerja, hal ini menunjukkan kemampuan pengelola kegiatan sudah memadai dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan lebih ditingkatkan pengelola kegiatan untuk lebih mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali (LKjIP) Tahun 2018 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.



Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Bali berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

1. Capaian Indikator Makro

Tujuan pembangunan Provinsi Bali telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat.

Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2014 s.d. Tahun 2018.

No.	Indikator Makro	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,73	6,03	6,32	5,57	6,35
2.	Inflasi (%)	8,43	2,75	3,18	3,32	3,13
3.	Penduduk Miskin (jiwa)	195,95	196,71	178,18	176,48	171,76
4.	Prosentase Penduduk Miskin (%)	4,76	5,25	4,15	4,14	4,01
5.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	3,5 juta orang	4,0 juta orang	4,13 juta orang	5,69 juta orang	6,02 juta orang
6.	IPM	72,48	73,27	73,65	74,30	n/a
7.	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	2,9 T	3,0 T	3,0 T	3,3 T	3,7 T

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 2018 (data diolah)

1.1 Laju Perekonomian Provinsi Bali



Gambar 3.1 Perekonomian Povinsi Bali

Kinerja ekonomi bali pada triwulan 2018 mengalami akselerasi kinerja dibandingkan triwulan III 2018. Ekonomi bali tercatat tumbuh sebesar 7,59% (yoy) di periode triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan teiwulan IV 2017 sebesar 4,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bali pada triwulan IV 2018, juga

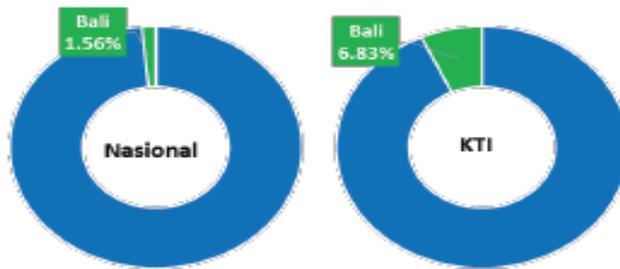
lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional di periode yang sama sebesar 5,18% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi Bali tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, didorong oleh meningkatnya kinerja empat lapangan usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha

akomodasi makan dan minum; pertanian; perdagangan besar dan eceran; serta industri pengolahan. Akselerasi kinerja ekonomi Bali tersebut, didorong oleh beberapa faktor yaitu, i) *base effect* melambatnya perekonomian Bali pada triwulan IV 2017 akibat peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung; ii) peningkatan ekspor, baik ekspor jasa yang tercermin pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun ekspor barang ke luar negeri maupun ekspor barang luar negeri; iii) peningkatan luas panen dan produksi padi pada triwulan laporan; iv) penyelenggaraan IMF WB *Annual Meeting* 2018; dan v) perayaan hari besar keagamaan (Galungan dan Natal) serta Tahun Baru 2019.

Ekonomi Bali di tahun 2018 mengalami akselerasi kinerja dengan tumbuh sebesar 6,35% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,57% (yoy). Capaian kinerja ekonomi Bali tersebut, juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2018 sebesar 5,17% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu untuk sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya kinerja empat lapangan usaha utama Bali, yaitu lapangan usaha pertanian, konstruksi, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan.



Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Tahunan



Grafik 3.2 Pangsa Ekonomi Bali terhadap KTI dan Nasional Tahun 2018

Dari sisi permintaan, prakiraan melambatnya kinerja ekonomi Bali terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran perlambatan diperkirakan disebabkan oleh melambatnya seluruh lapangan usaha utama ekonomi Bali yaitu lapangan usaha akomodasi makan dan minum, pertanian, transportasi, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.

Realisasi belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp35,99 triliun atau meningkat 5,24% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tahun 2017 yang sebesar 12,43% (yoy) atau tercatat Rp34,20 triliun. Melambatnya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tersebut, disebabkan oleh melambatnya semua pertumbuhan komponen realisasi belanja yaitu APBN dan APBD 9 kabupaten/ kota, bahkan APBD Provinsi mengalami penurunan realisasi belanja. Adanya kebijakan rasionalisasi (penghematan) anggaran belanja pada tingkat provinsi di tahun 2018 untuk membiayai peningkatan defisit 2019 dan tidak terealisasinya target PAD pada beberapa daerah, akibat melambatnya pertumbuhan jumlah kunjungan wisman, menjadi beberapa faktor yang menahan laju pertumbuhan realisasi belanja pemerintah tersebut.

Pada sisi yang lain, realisasi pendapatan pemerintah (APBD Provinsi Bali dan APBD gabungan 9 kabupaten/kota) pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp24,29 triliun atau tumbuh 2,53% (yoy), lebih rendah dibanding tahun 2017



sebesar 10,95% (yoy) atau Rp23,69 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan terutama pada level kabupaten/kota, akibat rendahnya pencapaian realisasi PAD. Dengan kondisi tersebut, persentase realisasi pendapatan pemerintah pada tahun 2018 hanya mencapai 90,03%, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sebesar 97,31%.

Dari sisi penawaran, akselerasi perekonomian Bali tahun 2018 didorong oleh meningkatnya kinerja beberapa lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan, perikanan (pangsa 13,8%); transportasi dan pergudangan (pangsa 9,5%); konstruksi (pangsa 9,4%); serta industri pengolahan (pangsa 6,1%). Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian didorong oleh peningkatan luas lahan panen dan peningkatan produksi untuk komoditas padi, seiring dengan berkurangnya serangan hama, penggunaan benih unggul dan upaya optimalisasi penggunaan lahan. Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan didorong oleh penambahan rute penerbangan baru, baik dalam negeri maupun luar negeri dari dan ke Bali. Sementara itu, peningkatan kinerja konstruksi didorong oleh pengerjaan proyek konstruksi, baik yang menggunakan anggaran pemerintah maupun swasta, termasuk dalam rangka penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. Meningkatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali, khususnya Amerika Serikat (AS) dan upaya pengembangan pasar ekspor alternatif mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Namun demikian, akselerasi lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum (pangsa 23,34%) dan perdagangan besar dan eceran (pangsa 8,5%), seiring dengan melambatnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 dibanding tahun 2017, sebagai dampak terjadinya beberapa bencana alam yang terjadi di sekitar Wilayah Bali.

1.2 Laju Inflasi Bali



Gambar : 3.2 Inflasi Bali

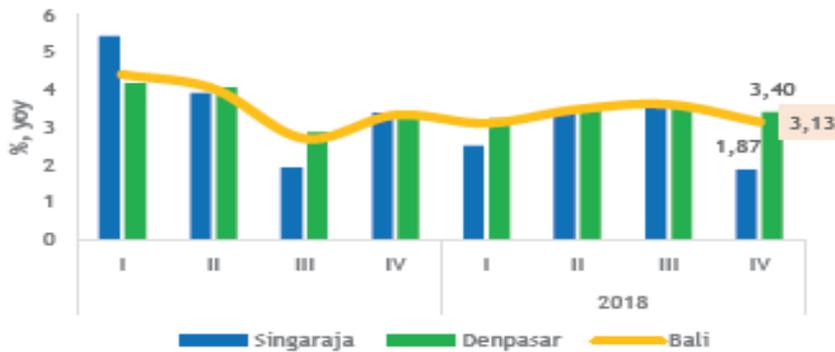
Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,13% (yoy), melandai dibanding triwulan III 2018 yang sebesar 3,60% (yoy). Capaian inflasi Bali pada periode laporan sama dengan realisasi inflasi Nasional yang juga

mencapai 3,13% (yoy). Melandainya realisasi inflasi tersebut terjadi disebabkan oleh melandainya tekanan inflasi pada kelompok *volatile food* dan kelompok *core inflation*, sementara kelompok *administered price* menunjukkan peningkatan. Inflasi Bali pada tahun 2018 yang sebesar 3,13% (yoy), masih lebih rendah dibanding inflasi tahun 2017 sebesar 3,32% (yoy). Capaian inflasi tahun 2018 tersebut masih berada dalam sasaran inflasi Nasional 2018, yaitu 3,5%±1% (yoy).

Terjaganya inflasi di Provinsi Bali didukung oleh solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait lainnya dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang dapat mendorong terjadinya peningkatan harga, yaitu tetap tingginya tarif angkutan udara yang akan memberikan tekanan pada inflasi kelompok *administered price* dan frekuensi curah hujan yang tinggi serta gelombang laut yang tinggi serta ketergantungan pasokan bahan pangan pada daerah lain berpotensi mendorong peningkatan inflasi pada kelompok *volatile food*.

Sementara berdasarkan kota pembentuknya, penurunan tekanan inflasi di triwulan IV 2018 terjadi pada kedua kota Denpasar dan Singaraja, masing-masing dari 3,61% (yoy) dan 3,54% (yoy) menjadi 3,40% (yoy) dan 1,88% (yoy).

Secara bulanan, inflasi Bali pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 0,79 (mtm), dengan rincian kota sampel Inflasi Denpasar sebesar 0,77% (mtm) dan Singaraja 0,84% (mtm).



Grafik 3.3 Inflasi Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi terjadi di kedua kota sampel penghitungan inflasi di Bali. Kota Denpasar mencatat inflasi 0,62% (mtm) atau 3,07% (yoy), sementara kota Singaraja mencatat inflasi 0,58% (mtm) atau 1,59% (yoy). Dibanding kota sampel lainnya, pencapaian inflasi Kota Denpasar dan Singaraja berada pada level yang moderat. Komoditas penyumbang inflasi di Denpasar adalah angkutan udara (andil sebesar 0,29), tarif sewa rumah (0,44), daging ayam ras (0,07), bawang merah (0,07), dan air kemasan (0,06). Sementara, komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain bensin (andil sebesar -0,06), tongkol pindang (-0,03), buncis (-0,02), sawi hijau (-0,02), dan rampela hati ayam (-0,02). Sementara, di Kota Singaraja, komoditas yang menyumbang inflasi pada Januari 2019 adalah cabai rawit (andil sebesar 0,22), tukang bukan mandor (0,177), daging ayam ras (0,13), beras (0,07), dan bawang merah (0,07). Sementara, komoditas yang mengalami deflasi adalah buncis (andil sebesar -0,10), bensin (-0,05), mie kering instan (-0,04), ketimun (-0,03), dan bawang putih (-0,02).

1.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Perkembangan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Tingkat kemiskinan Bali terus mengalami penurunan.



Gambar 3.3 Kujungan Gubernur Bali ke Penduduk Miskin

Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan Bali berada di 4,88 persen dan menurun di tahun 2011 menjadi 4,20 persen, di tahun 2012 pemerintah Provinsi Bali menargetkan tingkat kemiskinan Bali dapat menurun lagi menuju angka 3,62 persen, dan di tahun 2012 terealisasi 3,95 persen dari total penduduk Bali.

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan tingkat kemiskinan Bali dapat menurun lagi menuju angka 3,62 persen, dan di tahun 2012 terealisasi 3,95 persen dari total penduduk Bali. Tahun 2013 tingkat kemiskinan Bali 4,49 persen kemudian di tahun 2014 tingkat kemiskinan Bali menembus angka 4,76 persen, di tahun 2015 jumlah penduduk miskin diangka 218,79 ribu orang dengan persentase capaian 5,25. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya di tahun 2015 mengalami peningkatan cukup signifikan baik itu penduduk miskin di daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami kenaikan.

Jumlah Penduduk miskin pada September 2017 176,48 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 174,94 ribu orang, maka selama enam bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin 1,54 ribu. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode



September 2016 – September 2017, baik penduduk miskin di daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2018 mencapai 171,76 ribu orang. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 176,48 ribu orang, atau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,72 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di Bali juga mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dari 4,14 persen pada September 2017 menjadi 4,01 persen pada Maret 2018.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebanyak 96,07 ribu orang, turun menjadi 94,03 ribu orang pada Maret 2018, atau berkurang sebanyak 2,04 ribu orang. Demikian juga jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 80,40 ribu orang pada September 2017 menjadi 77,73 ribu orang pada Maret 2018, atau berkurang sebanyak 2,67 ribu orang. Secara persentase, pada periode yang sama persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 3,46 persen, turun menjadi 3,32 persen pada Maret 2018. Demikian juga persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 5,42 persen pada September 2017 menjadi 5,38 persen pada Maret 2018.



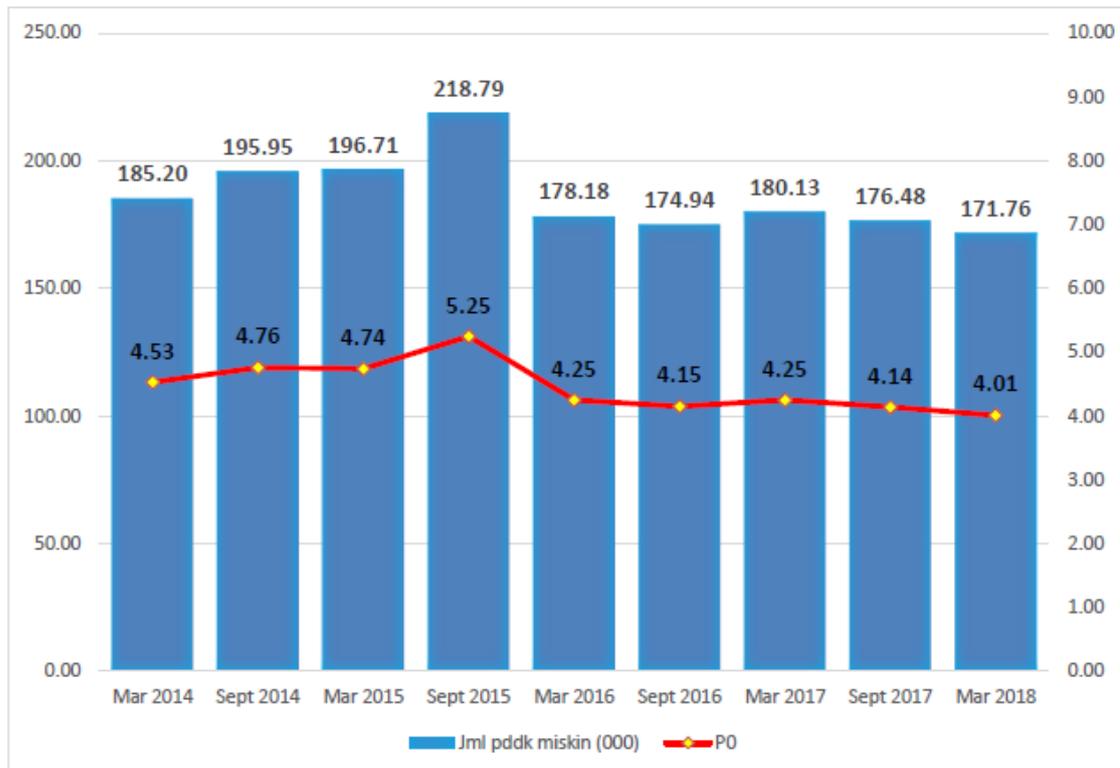
Tabel 3.1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2017-Maret 2018

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2017	96,07	3,46	371.118
Maret 2018	94,03	3,32	387.566
Perdesaan			
September 2017	80,40	5,42	350.826
Maret 2018	77,73	5,38	372.828
Kota + Desa			
September 2017	176,48	4,14	364.064
Maret 2018	171,76	4,01	382.598

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Menunjukkan perkembangan kemiskinan di Bali yang cukup berfluktuasi. Pada periode Maret 2014 sampai dengan September 2015 persentase penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan, sedangkan periode September 2015 sampai Maret 2018 persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2017, penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan, kemudian pada September 2017 kembali mengalami penurunan.

Grafik 3.4
Perkembangan Kemiskinan di Bali
Maret 2014-Maret 2018



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada September 2017 dan Maret 2018.



Selama periode September 2017 - Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,09 persen yaitu dari Rp 364.064,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 382.598,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK di perkotaan pada September 2017 sebesar 67,98 persen mengalami peningkatan menjadi 68,02 persen pada Maret 2018. Di perdesaan, besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2017 sebesar 71,63 persen turun menjadi 70,99 persen pada Maret 2018.

Tabel 3.1.2
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
September 2017-Maret 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2017	252.298	118.820	371.118
Maret 2018	263.613	123.953	387.566
Perubahan Sept '17 - Mar '18 (%)	4,48	4,32	4,43
Perdesaan			
September 2017	251.307	99.519	350.826
Maret 2018	264.685	108.143	372.828
Perubahan Sept '17 - Mar '18 (%)	5,32	8,67	6,27
Kota + Desa			
September 2017	251.921	112.143	364.064
Maret 2018	263.995	118.604	382.598
Perubahan Sept '17 - Mar '18 (%)	4,79	5,76	5,09

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selama periode September 2017 - Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,09 persen yaitu dari Rp 364.064,- per kapita per bulan pada



September 2017 menjadi Rp 382.598,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK di perkotaan pada September 2017 sebesar 67,98 persen mengalami peningkatan menjadi 68,02 persen pada Maret 2018. Di perdesaan, besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2017 sebesar 71,63 persen turun menjadi 70,99 persen pada Maret 2018.

Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan Maret 2018 baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama. Adapun komoditi makanan yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perkotaan antara lain: beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, bawang merah, roti, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi makanan yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perdesaan antara lain: beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, kue basah, daging ayam ras, roti, bawang merah, cabe rawit, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), gula pasir. Pada komoditi bukan makanan, komoditi yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perkotaan antara lain: perumahan, bensin, listrik, upacara agama atau adat lainnya, dan pendidikan. Adapun komoditi bukan makanan yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perdesaan antara lain: perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan kayu bakar.

Grafik 3.5 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2015 s.d 2017



1.4 Kunjungan Wisatawan Asing

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali pada bulan Desember 2018 tercatat mencapai 498.819 kunjungan. Angka ini naik sebesar 22,64 persen dibandingkan dengan catatan bulan November 2018 (*m to m*). Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2017 (*y on y*) jumlah kunjungan wisman mengalami peningkatan sebesar 57,90 persen. Pada bulan Desember 2018, sebagian besar wisman ke Bali datang melalui bandara, yaitu sebanyak 495.641 kunjungan, sedangkan yang datang melalui pelabuhan laut sebesar 3.178 kunjungan. Dibandingkan dengan catatan bulan yang sama tahun 2017 (*y on y*), jumlah wisman yang datang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai naik sebesar 61,28 persen. Bila dibandingkan dengan catatan bulan November 2018 (*m to m*), kunjungan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di bulan Desember 2018 juga tercatat meningkat sebesar 21,88 persen. Wisman yang datang melalui pelabuhan laut pada bulan Desember 2018 turun hingga -62,99 persen dibandingkan bulan Desember 2017 (*y on y*). Jika dibandingkan dengan bulan November 2018 (*m to m*), kunjungan wisman yang datang melalui pelabuhan laut mengalami peningkatan hingga ribuan persen. Hal ini diduga terkait adanya kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa.

Tabel 3.1.3

Kedatangan Wisman Langsung ke Bali

Menurut Pintu Masuk Desember 2017, November 2018 dan Desember 2018

No	Pintu Masuk	Desember 2017	November 2018	Desember 2018	Perubahan (%)		Peran Thd Total
					Des 2018 thd Nov 2018	Des 2018 thd Des 2017	
1	Bandara	307.321	406.679	495.641	21,88	61,28	99,36
2	Pelabuhan	8.588	46	3.178	6.808,70	-62,99	0,64
Jumlah		315.909	406.725	498.819	22,64	57,90	100,00

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2017, data diolah

Tabel 3.1.4
Kedatangan Wisman Langsung ke Bali
Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Desember 2017, November 2018 dan
Desember 2018.

No	Kebangsaan	Wisman Desember 2018			Persen tase (%)	Wisman November 2018	Wisman Desember 2017	Perubahan Wisman Des 2018 Thd Nov 2018 (%)	Perubahan Wisman Des 2018 Thd Des 2017 (%)
		Pintu Masuk		Total					
		Bandara	Pelabuhan Laut						
1	Australia	101.787	4	101.791	20,41	87.260	79.222	16,65	28,49
2	Tiongkok	80.447	4	80.451	16,13	73.793	11.530	9,02	597,75
3	India	33.665	0	33.665	6,75	28.629	29.123	17,59	15,60
4	Malaysia	24.184	0	24.184	4,85	16.209	15.585	49,20	55,17
5	Singapura	23.564	0	23.564	4,72	12.731	13.971	85,09	68,66
6	Amerika Serikat	22.773	2	22.775	4,57	18.948	13.245	20,20	71,95
7	Jepang	22.751	0	22.751	4,56	19.317	15.304	17,78	48,66
8	Inggris	19.602	3	19.605	3,93	16.686	15.170	17,49	29,24
9	Rusia	14.321	1	14.322	2,87	8.478	9.501	68,93	50,74
10	Korea Selatan	13.987	0	13.987	2,80	11.663	6.661	19,93	109,98
11	Lainnya	138.560	3.164	141.724	28,41	113.011	106.597	25,41	32,95
	Total	495.641	3.178	498.819	100,00	406.725	315.909	22,64	57,90

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018, data diolah

Menurut kebangsaan, wisman yang tercatat paling banyak datang ke Bali pada bulan Desember 2018 adalah wisman dengan kebangsaan Australia (20,41 persen), Tiongkok (16,13 persen), India (6,75 persen), Malaysia (4,85 persen), Singapura (4,72 persen), Amerika Serikat (4,57 persen), Jepang (4,56 persen), Inggris (3,93 persen), Rusia (2,87 persen), dan Korea Selatan (2,80 persen). Tabel 2 menyajikan data sepuluh negara dengan jumlah wisman terbanyak yang berkunjung ke Bali pada bulan Desember 2018.

Dibandingkan dengan bulan November 2018 (*m to m*), dari sepuluh negara dengan jumlah wisman terbanyak (Tabel 2), seluruh negara mengalami peningkatan dengan peningkatan yang cukup tinggi berasal dari Singapura sebesar 85,09 persen, disusul oleh wisman dari Rusia yang mengalami peningkatan sebesar 68,93 persen dan Malaysia sebesar 49,20 persen. Peningkatan secara umum diduga karena bertepatan dengan perayaan tahun baru 2019.



Jika dibandingkan dengan Desember 2017 (*y on y*), seluruh negara utama asal wisman mengalami peningkatan jumlah wisman, dengan peningkatan tertinggi hingga ratusan persen dicapai wisman yang berasal dari Tiongkok (597,75 persen) dan Korea Selatan (109,98 persen).

Tabel 3.1.5
Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Januari-Desember 2018.

No.	Kebangsaan	Wisman Januari – Desember 2018				Wisman Jan – Des 2017 (Orang)	Perubahan Wisman Jan – Des 2018 Thd Jan – Des 2017
		Bandara (Orang)	Pelabuhan (Orang)	Total (Orang)	Persentase (%)		
1	Tiongkok	1.361.326	186	1.361.512	22,43	1.385.850	-1,76
2	Australia	1.155.240	13.975	1.169.215	19,26	1.094.974	6,78
3	India	352.652	1.242	353.894	5,83	272.761	29,75
4	Inggris	267.210	3.579	270.789	4,46	243.827	11,06
5	Jepang	260.246	1.420	261.666	4,31	252.998	3,43
6	Amerika Serikat	231.682	4.896	236.578	3,90	191.106	23,79
7	Perancis	195.657	77	195.734	3,22	177.864	10,05
8	Malaysia	192.529	2.231	194.760	3,21	170.459	14,26
9	Jerman	185.243	620	185.863	3,06	177.184	4,90
10	Singapura	141.543	3.006	144.549	2,38	125.934	14,78
11	Lainnya	1.683.831	12.082	1.695.913	27,94	1.604.782	5,68
Jumlah		6.027.159	43.314	6.070.473	100,00	5.697.739	6,54

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2017

Secara kumulatif, jumlah wisman yang datang langsung ke Bali selama tahun 2018 tercatat mencapai 6.070.473 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 (*y on y*) yang tercatat mencapai 5.697.739 orang, atau naik sebesar 6,54 persen. Kunjungan wisman selama tahun 2018 didominasi oleh wisman asal Tiongkok (22,43 persen), Australia (19,26 persen), India (5,83 persen), Inggris (4,46 persen), Jepang (4,31 persen), Amerika Serikat (3,90 persen), Perancis (3,22 persen), Malaysia (3,21 persen), Jerman (3,06 persen), dan Singapura (2,38 persen).

Negara yang mengalami peningkatan jumlah wisman terbesar selama tahun 2018 berasal dari India, yaitu tercatat sebesar 29,75 persen. Hal ini diduga terkait dibukanya penerbangan langsung Denpasar-Mumbai. Sementara wisman asal Tiongkok mengalami penurunan hingga -1,76 persen. Hal ini diduga terkait

terbongkarnya kasus praktek mafia perjalanan wisata dari Tiongkok pada bulan Oktober 2018.

1.5 Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 3.4 SMA dan SMK Bali Mandara

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing*

power parity). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Grafik 3.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 2010-2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2018, data diolah

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Bali terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Bali meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 74,30 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,84 persen per tahun dan selalu berada di level “tinggi”. Pada periode 2016-2017, IPM Bali tumbuh 0,88 persen. IPM Bali tercatat berada di posisi lima tertinggi secara nasional, di bawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.



Tabel 3.1.6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Komponen, 2010-2017

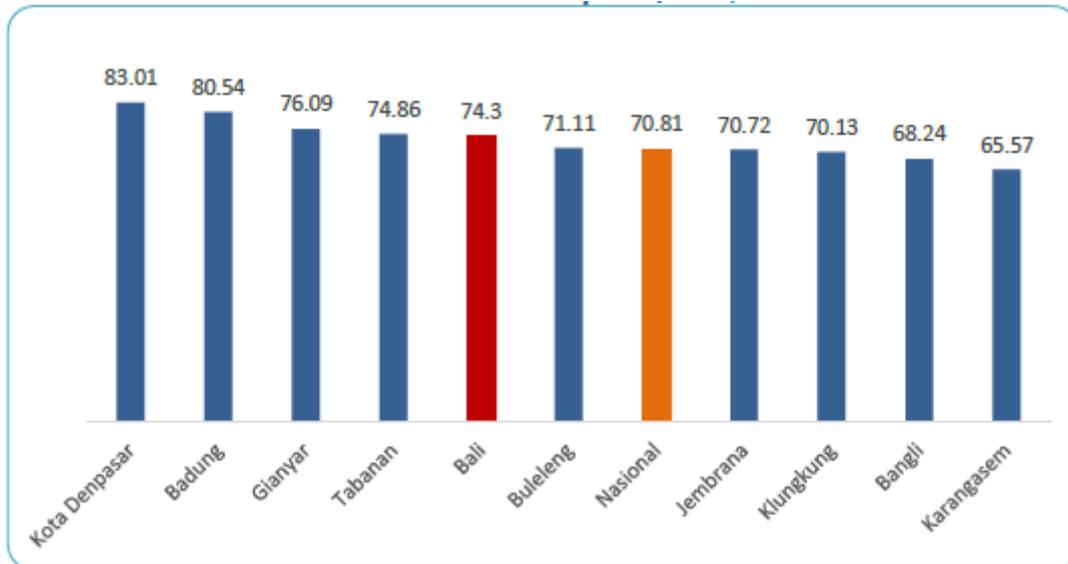
Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,61	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,71	12,12	12,26	12,4	12,64	12,97	13,04	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,77	8,05	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	12.074	12.307	12.530	12.738	12.831	13.078	13.279	13.573
IPM		70,10	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30
Pertumbuhan IPM	%	-	1,10	1,06	0,66	0,54	1,09	0,52	0,88

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2018, data diolah

Pada tahun 2017, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 65,57 (Karangasem) hingga 83,01 (Denpasar). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 69,83 tahun (Bangli) hingga 74,53 tahun (Badung). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,30 tahun (Bangli) hingga 13,97 tahun (Denpasar), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,52 tahun (Karangasem) hingga 11,15 tahun (Denpasar). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 9,8 juta rupiah per tahun (Karangasem) hingga 19,36 juta rupiah per tahun (Denpasar).

Grafik 3.6

IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota 2017



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2018, data diolah

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2017 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus “sedang” tercatat hanya sebanyak dua kabupaten, yakni Bangli dan Karangasem. Lima kabupaten tercatat berstatus “tinggi” pada tahun 2017. Khusus kabupaten Klungkung mengalami perubahan status, dari “sedang” pada tahun sebelumnya menjadi “tinggi” pada tahun 2017. Hingga saat ini, terdapat 2 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi”, yaitu Badung dan Denpasar. Kabupaten Badung mencatat kemajuan yang cukup pesat atau berubah menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2017 setelah tahun sebelumnya hanya berstatus “tinggi”. Kota Denpasar sendiri sudah tercatat berstatus “sangat tinggi” semenjak tahun 2012 sampai sekarang.

Selama periode 2016 hingga 2017, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan angka IPM. Pada periode ini peningkatan IPM Kabupaten Jembrana tercatat sebagai yang terendah, dengan peningkatan sebesar 0,48 persen. Sedangkan Kabupaten Karangasem, Gianyar dan Kota Denpasar tumbuh lebih tinggi, sebesar 0,52 persen. Meskipun IPM Kabupaten Bangli tercatat sebagai



yang terakhir ke dua setelah Kabupaten Karangasem, peningkatan IPM-nya tercatat sebagai yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,81 persen. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung dan Badung juga tercatat paling cepat dengan pertumbuhan masing-masing 1,18 persen dan 0,93 persen.

Tabel 3.1.7

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016-2017
Jembrana	71,57	71,70	12,27	12,40	7,59	7,62	11.343	11.468	70,38	70,72	0,48
Tabanan	72,89	73,03	12,87	12,95	8,10	8,43	13.800	13.923	74,19	74,86	0,90
Badung	74,42	74,53	13,66	13,94	9,90	9,99	16.567	17.063	79,80	80,54	0,93
Gianyar	72,95	73,06	13,36	13,37	8,86	8,87	13.766	14.222	75,70	76,09	0,52
Klungkung	70,28	70,45	12,86	12,94	7,06	7,46	10.852	11.005	69,31	70,13	1,18
Bangli	69,69	69,83	11,82	12,30	6,44	6,80	10.819	10.956	67,03	68,24	1,81
Karangasem	69,66	69,85	12,33	12,38	5,48	5,52	9.690	9.833	65,23	65,57	0,52
Buleleng	70,97	71,14	12,61	12,62	6,85	7,03	12.814	12.995	70,65	71,11	0,65
Kota Denpasar	74,04	74,17	13,76	13,97	11,14	11,15	19.084	19.364	82,58	83,01	0,52
BALI	71,41	71,46	13,04	13,21	8,36	8,55	13.279	13.573	73,65	74,30	0,88

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2018, data diolah

Secara konseptual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali guna meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah adalah melalui program unggulan Bali Mandara, pengentas angka melek huruf telah gencar dilaksanakan di antaranya pendirian SMA dan SMK Bali Mandara, SMA dan SMK ini diprioritaskan bagi masyarakat dalam kata gori miskin di Provinsi Bali,



SMA dan SMK Bali Mandara mengadopsi sistem sama seperti sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri yaitu IPDN mulai dari sistem pendidikan, pengasuhan, dan pelatihan diterapkan guna membentuk karakter siswa yang siap menghadapi persaingan ketat di kancah pendidikan maupun dikancah dunia pekerjaan.

1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Provinsi Bali di Tahun 2018 membukukan pendapatan asli daerah senilai Rp. 3,7 triliun, meningkat 4,02 persen dibandingkan dengan realisasi 2017, Rp. 3,3 triliun. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Bali pada tahun 2018 dari Pajak Daerah sebesar Rp. 3,2 Triliun, Hasil Retribusi Daerah Rp. 47 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 170 Milyar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 269 Milyar. Realisasi itu merupakan hasil bersama dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah. Bahwa kendaraan bermotor menjadi penopang utama pajak bagi kas Pemerintah Provinsi Bali setelah pajak air bawah tanah (ABT) dan beberapa pajak lainnya diserahkan ke kabupaten/kota. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali menerapkan pajak progresif bagi pemilik roda empat turut memberikan andil meskipun nilainya masih kecil.

Selama Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan perbaikan layanan agar masyarakat lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotor seperti layanan samsat online. Berbagai upaya tersebut, terbukti mampu meningkatkan pemasukan terhadap kas daerah. Di Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali melampaui Target pendapatan dari sektor pajak daerah untuk sementara ditetapkan sama seperti realisasi tahun lalu Rp. 3,2 triliun.

Ditargetkan kerja sama itu terealisasi pada tahun 2018 sehingga dapat langsung diimplementasikan. Khusus di daerah-daerah pinggiran, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menambah layanan kantor samsat pembantu di Gilimanuk, Kabupaten Buleleng dan Pupuan Kabupaten Tabanan. Upaya lain yang saat ini tengah dikejar adalah pengoptimalan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Bali guna menghasilkan pendapatan lebih besar, bekerja sama dengan



Perusda Bali. Perusahaan Daerah akan menggandeng investor untuk mengembangkan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali di Renon, Denpasar menjadi pusat bisnis guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Di lokasi itu terdapat lahan seluas 4 Ha yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali, tetapi selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan daerah. Rencananya pusat bisnis yang akan dibangun berkonsep seperti trans studio, serta terdapat tenant-tenant yang menyediakan fasilitas bagi kalangan masyarakat menengah atas. Terdapat dua investor yang menyatakan kesiapannya menanamkan dana senilai Rp.195 miliar untuk pembangunan di lahan mangkrak yang berlokasi dikawasan *Civic Centre* tersebut.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 10 (Sepuluh) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 dapat disajikan dalam table terlampir, dan pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Iptek dan Daya Saing SDM Serta Kesehatan Masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani.



Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Iptek dan Daya Saing SDM serta Kesehatan Masyarakat.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian akhir pada tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Melek Huruf	103,03	90,42%	92,98%	103,53	90,42%	103,53
2	Angka rata-rata lama sekolah	103,08	8,11%	n/a	n/a	8,11%	n/a
3	Index Pembangunan Manusia (IPM)	n/a	74,47%	n/a	n/a	74,47%	n/a
4	Angka usia harapan hidup	100	71,51%	n/a	n/a	71,51%	n/a
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	78,31	2,2%	1,37%	62,27	2,2%	62,27
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi Kompetensi	100	170	170	100	170	100

2.4.1 Angka Melek Huruf

Berdasarkan data Pendidikan Provinsi Bali 2018, terkait dengan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di Provinsi Bali terlihat jelas bahwa AMH tahun 2017 dengan capaian 92,90 persen kemudian Dinas Pendidikan Prov. Bali ditahun 2018 setelah Perbaikan RPJMD dengan mentargetkan capaian kinerja sebesar 90,42 persen ternyata realisasi lapangan mencapai 92,98 persen.



Jika, diformulasi pada capaian prestasi kerja tahun 2018 ternyata ada progres peningkatan jumlah penduduk yang mengikuti program melek huruf sebesar 0,08 persen atau Dinas Pendidikan Provinsi Bali mampu mencapai prestasi kerja sampai 103,53 persen. Sehingga capaian progres pekerjaan program melek huruf sampai dengan 2013 terhadap Renstra 2018 adalah sebesar 103.53 persen.

Tentu ini sebuah prestasi pekerjaan penanganan melek huruf di Provinsi Bali berjalan sangat efektif. Keberhasilan ini jelas disebabkan adanya kontribusi Kabupaten/Kota untuk melakukan pekerjaan yang sama. Lihat Tabel berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Program Melek Huruf Tahun 2018

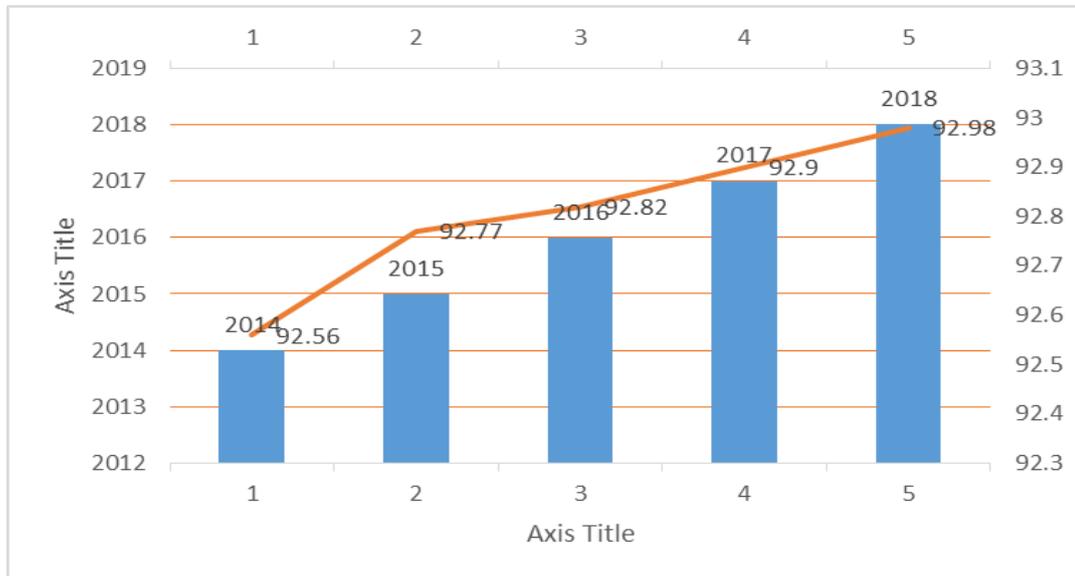
Capaian Tahun 2017 (%)	Tahun 2018			Renstra 2018	Capaian akhir pada tahun 2018 (%)
	Target	Realisasi	%		
103,03	90,42%	92,98%	103,53	90,42%	103,53

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2018

Secara nasional AMH Provinsi Bali pada Tahun 2017 lalu, menduduki peringkat ke-5, peringkat ini masih cukup jauh dengan rata-rata nasional. Namun demikian jika dibandingkan dengan Provinsi tetangga maka Provinsi Bali masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Angka Melek Huruf Provinsi NTT mencapai 89,59 persen, Jawa Timur (89,52 persen) dan NTB baru mencapai 85,24 persen. Meskipun angka melek huruf di Provinsi Bali lebih rendah dari nasional tetapi dari segi perkembangan kecepatan keberhasilan program pendidikan masih lebih tinggi di Provinsi Bali. Hal ini dapat dilihat pada Tabel perkembangan berikut:

Grafik 3.7 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Bali Tahun 2014 s.d 2018



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2018

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan diberbagai jenjang.

Permasalahan :

1. Kualitas SDM pendidikan masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas di bidang pembelajaran. Aspek penting dari tenaga pendidikan bukan hanya sekedar kecukupan jumlah, yang dari tahun ke tahun sudah menunjukkan perkembangan positif. Kualitas SDM pendidikan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas pendidikan yang dihasilkan
2. Masih terdapat banyaknya jumlah mayoritas generasi tua, yang tidak mengenyam pendidikan, dengan jumlah buta huruf di Provinsi Bali sebesar 134.800 jiwa.



Solusi :

Untuk menjawab persoalan kapasitas ekonomi yang terbatas, Pemerintah Provinsi Bali memberi perhatian serius terhadap kualitas pendidikan masyarakat Bali. Hal ini dibuktikan dengan bantuan baik dalam bentuk bantuan keuangan khusus maupun beasiswa yang diberikan bagi dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan keterjangkauan layanan pendidikan yang meliputi beasiswa miskin jenjang SD untuk 2.000 siswa, beasiswa miskin jenjang SMP untuk 2.000 siswa, beasiswa miskin jenjang SMA untuk 2.000 siswa, beasiswa miskin jenjang SMK untuk 2.000 siswa.
2. Penyediaan layanan pendidikan yang berupa kegiatan peningkatan sarana/prasarana PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, pembangunan SMAN Bali Mandara, Pembangunan SMK Bali Mandara penguatan kelembagaan PAUD, dan pengembangan RSBI.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang meliputi kegiatan antara lain pembinaan
4. Pemenuhan keterjangkauan layanan pendidikan yang meliputi beasiswa miskin jenjang SD untuk 2.000 siswa, beasiswa miskin jenjang SMP untuk 2.000 siswa, beasiswa miskin jenjang SMA untuk 2.000 siswa, beasiswa miskin jenjang SMK untuk 2.000 siswa.
5. Kegiatan lainnya adalah beasiswa miskin pada fakultas langka peminat untuk 500 mahasiswa, Pendidikan siswa miskin dan berprestasi (Bidikmisi) pada Fakultas Kedokteran UNUD bagi 10 orang serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri untuk 54.889 siswa. Disamping BOP, Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total jumlah penerima SD dan SMP berjumlah 634.847 siswa.

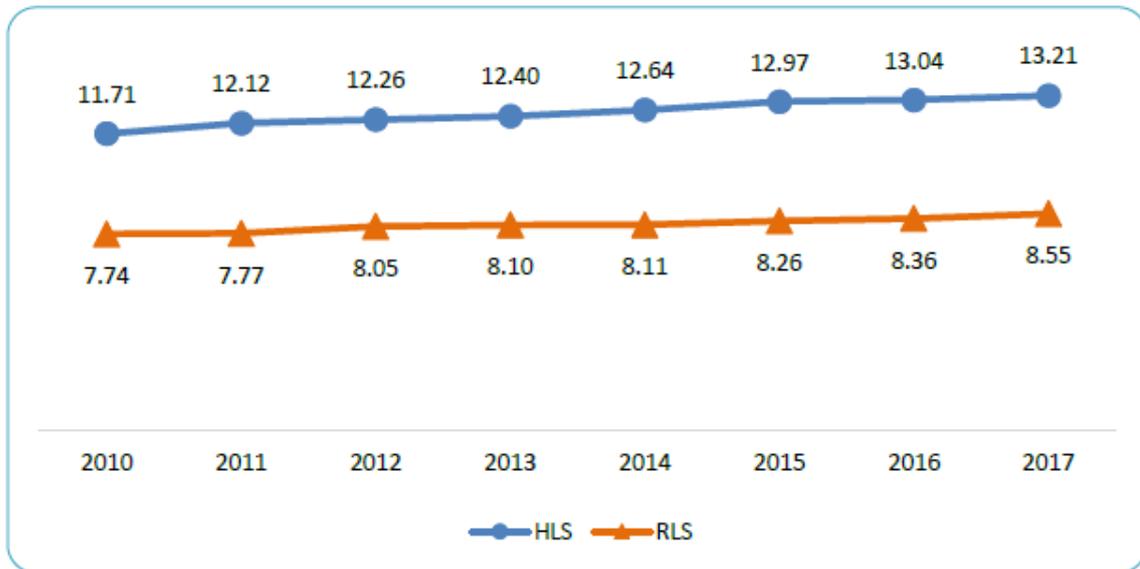


2.4.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga Negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.

Sebagai bayangan terkait dengan dinamika pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 di Provinsi Bali mencapai 8,55 tahun atau setara dengan sekolah kelas tiga SMP namun tidak tamat. Sedangkan untuk rata-rata nasional pada tahun 2017 baru mencapai 7,95 tahun atau baru duduk dikelas dua SMP. Capaian yang cukup menggembirakan lainnya ditunjukkan dengan tingginya tingkat perkembangan (*reduksi shortfall*) rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan nasional. Selama kurun waktu 2010-2017 tingkat perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mencapai 2,04 tahun sedangkan untuk tingkat nasional mencapai 1,84 tahun. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.8 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2011-2017.



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2018

Hal yang cukup menggembirakan terkait dengan perkembangan rata-rata lama sekolah dalam rentang waktu 2 tahun periode 2015-2017 yakni telah terjadi pertumbuhan sebesar rata-rata 0,13 tahun. Artinya, pada tahun 2017 rata-rata penduduk Provinsi Bali telah menempuh pendidikan selama 8,55 persen. Sehingga capaian target rata-rata penduduk Provinsi Bali berpendidikan 9 tahun (tamat SMP) tinggal lagi 0,06 persen. Angka tersebut bergerak perlahan rata-rata lama pendidikan 8,26 ditahun 2015 menjadi 8,55 ditahun 2017.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali tumbuh 1,43 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif ini kiranya merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Bali yang lebih baik. Pada tahun 2017, secara rata-rata penduduk Bali usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan selama 8,55 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).



Hal yang menyebabkan meningkatnya nilai rata-rata lama sekolah per tahunnya dikarenakan senergitas serta komitmen antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mewujudkan wajib belajar 12 Tahun. Prestasi peningkatan ini juga akan menjadi acuan untuk tidak puas diri dalam melakukan amanah guna menciptakan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat di Provinsi Bali.

Provinsi Bali juga patut berbangga atas capaian prestasi rata-rata lama sekolah penduduk sebesar 8.36 jika dibandingkan dengan Provinsi tetangga yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cukup jauh perbedaanya. Bahkan ketiga Provinsi tetangga masih dibawah nasional sedangkan di Provinsi Bali sudah berada di atas nasional. Untuk Provinsi Jawa Timur capaian angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,84 tahun; NTB (7,01 tahun) dan Provinsi NTT mencapai 6,97 tahun.

Permasalahan :

Masih terdapatnya Fluktuasi angka putus sekolah. Data Provinsi Bali di berbagai pendidikan menunjukkan perlunya perhatian untuk menjawab persoalan putus sekolah. Sebagaimana persoalan ini perlu dijawab dengan upaya sinergis lintas bidang dan juga lintas aktor, seperti menjawab persoalan pekerjaan anak ataupun putus sekolah karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki. Putus sekolah menjadi sebuah masalah bagi Pemerintah Provinsi Bali hampir di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terdapat siswa yang putus sekolah. Jumlah angka putus sekolah tertinggi terdapat di Kabupaten Buleleng serta Kabupaten Badung.

Solusi :

1. Provinsi Bali akan mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar Kabupaten/Kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan
2. Upaya pengembangan berbagai skema dukungan pendanaan pendidikan, seperti pemberian beasiswa SD,SMP,SMA/SMK, pemberian bantuan biaya



pendidikan bagi fakultas yang minim peminat untuk mendorong mahasiswa melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, memberikan Beasiswa bagi siswa miskin yang berprestasi yang ingin melanjutkan ke jurusan kedokteran Universitas Udayana.

3. Persoalan putus sekolah merupakan persoalan yang kompleks, karena bukan hanya terkait dengan urusan pendidikan saja. Karena itu, diperlukan kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun menentukan karena menjadi kasalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak baik unsur pemerintah atau swasta dan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan.

2.4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010.

Secara umum, IPM Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Provinsi Bali meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 74,30 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,83 persen per tahun. Pada tahun 2016 – 2017 pertumbuhan IPM mencapai 0,88 persen atau Naik dibandingkan dengan pertumbuhan IPM sebelumnya yang tumbuh 0,52 persen.



Pertumbuhan IPM pada periode tahun 2010 hingga tahun 2017 tidak mengubah status capaian IPM Bali. Status IPM Bali masih digolongkan “tinggi” untuk tahun 2017. Capaian ini juga tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010. Selain itu capaian IPM Bali masih lebih rendah dibandingkan dengan target minimum RPJMD. Di tahun 2017 target minimum RPJMD Bali untuk IPM mencapai 74,47. Meskipun demikian dibandingkan dengan tahun 2014, perbedaan antara target minimum RPJMD dan IPM yang dirilis mengalami penurunan.

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2017 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus “sedang” tercatat hanya sebanyak dua kabupaten, yakni Bangli dan Karangasem. Lima kabupaten tercatat berstatus “tinggi” pada tahun 2017. Khusus kabupaten Klungkung mengalami perubahan status, dari “sedang” pada tahun sebelumnya menjadi “tinggi” pada tahun 2017. Hingga saat ini, terdapat 2 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi”, yaitu Badung dan Denpasar. Kabupaten Badung mencatat kemajuan yang cukup pesat atau berubah menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2017 setelah tahun sebelumnya hanya berstatus “tinggi”. Kota Denpasar sendiri sudah tercatat berstatus “sangat tinggi” semenjak tahun 2012 sampai sekarang.

Selama periode 2016 hingga 2017, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan angka IPM. Pada periode ini peningkatan IPM Kabupaten Jembrana tercatat sebagai yang terendah, dengan peningkatan sebesar 0,48 persen. Sedangkan Kabupaten Karangasem, Gianyar dan Kota Denpasar tumbuh lebih tinggi, sebesar 0,52 persen. Meskipun IPM Kabupaten Bangli tercatat sebagai yang terakhir ke dua setelah Kabupaten Karangasem, peningkatan IPM-nya tercatat sebagai yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,81 persen. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung dan Badung juga tercatat paling cepat dengan pertumbuhan masing-masing 1,18 persen dan 0,93 persen.

Permasalahan :

Kesenjangan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menjadi salah satu tantangan yang harus dijadikan fokus bagi agenda pembangunan di berbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan ini, pencapaian tujuan dan target pembangunan bisa jadi akan terganggu.

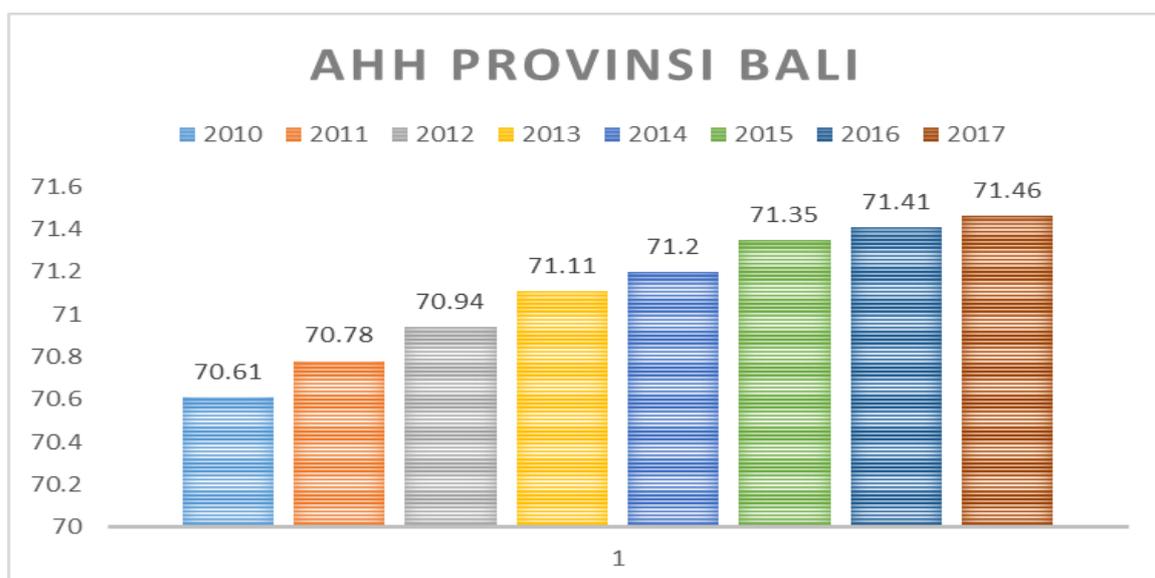
Solusi :

Pemerintah perlu membangun sinergi yang kontinu dan efektif membangun infrastruktur yang akan menciptakan perekonomian yang lebih baik di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sehingga masalah pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dapat terselesaikan dengan baik.

2.4.4 Angka Usia Harapan Hidup

Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi.

Grafik 3.9 Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Bali, 2010-2017 (Tahun)



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2018



Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 AHH Provinsi Bali tercatat mencapai 71,46 tahun atau meningkat 0,06 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan pada AHH di tahun 2016 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 0,05 tahun.

Tabel 3.2.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2017

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup (Thn)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Jembrana	70.75	70.92	71.09	71.26	71.39	71.43	71.57	71.7
Kab. Tabanan	72.02	72.18	72.35	72.52	72.64	72.74	72.89	73.03
Kab. Badung	73.77	73.91	74.05	74.19	74.3	74.31	74.42	74.53
Kab. Gianyar	72.31	72.43	72.57	72.71	72.78	72.84	72.95	73.06
Kab. Klungkung	69.26	69.45	69.66	69.84	69.91	70.11	70.28	70.45
Kab. Bangli	68.8	68.98	69.18	69.36	69.44	69.54	69.69	69.83
Kab. Karangasem	68.56	68.76	68.96	69.12	69.18	69.48	69.66	69.85
Kab. Buleleng	70.06	70.23	70.41	70.58	70.71	70.81	70.97	71.14
Kota Denpasar	73.24	73.34	73.44	73.56	73.71	73.91	74.04	74.17
Provinsi Bali	70.61	70.78	70.94	71.11	71.2	71.35	71.41	71.46

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, Bali telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,85 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Bali hanya sebesar 70,61 tahun, dan pada tahun 2017 telah mencapai 71,46 tahun.

Permasalahan :

1. Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat, namun belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.



2. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Provinsi Bali belum baik terutama ditinjau dari perilaku merokok di dalam rumah, kurangnya aktivitas fisik, serta kurangnya asupan buah dan sayur

Solusi :

1. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat.
2. Menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat berupa kartu yang berintegritas dengan program Kesehatan Pemerintah Pusat yaitu Kartu JKBM KIS serta mengintegrasikan jaminan kesehatan nasional agar menyasar betul bantuan tersebut ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

2.4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

Provinsi Bali sebagai ikon pariwisata nasional tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Bali, juga menjadi daya tarik bagi pencari kerja untuk mengadu peruntungannya. Industri pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian di Bali menyediakan peluang kerja yang menjanjikan baik bagi penduduk Bali maupun penduduk luar Bali. Meningkatnya jumlah penduduk tidak bisa lepas dari kenyataan tersebut, yang pada gilirannya membawa berbagai persoalan sosial ekonomi tersendiri, salah satunya masalah ketenagakerjaan.

Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Februari 2018 menunjukkan terjadi kenaikan angkatan kerja. Penduduk yang bekerja mengalami kenaikan sementara penduduk yang menganggur mengalami penurunan. Dari 3.266.054 penduduk usia kerja, 2.607.288 orang tergolong sebagai Angkatan Kerja (penduduk seminggu yang lalu bekerja atau menganggur). Dengan kata lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 79,83 persen. Sementara itu sebanyak 658.766 orang dari penduduk



usia kerja tergolong sebagai Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja dengan kegiatan seminggu yang lalu sekolah, mengurus rumahtangga, dan kegiatan lainnya. Dari jumlah angkatan kerja hasil Sakernas Februari 2018, penduduk yang bekerja mencapai 2.584.943 orang (99,14 persen). sementara hanya 0,86 persen (22.345 orang) angkatan kerja yang menganggur.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2018 naik sebesar 147.449 orang bila dibandingkan dengan kondisi Februari 2017 (mencapai 2.437.494 orang). Demikian juga halnya bila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada Agustus 2017, mengalami kenaikan sebesar 186.636 orang (Agustus 2017 mencapai 2.398.307 orang).

Sementara itu pengangguran Februari 2018 mencapai 0,86 persen mengalami penurunan sebesar 0,42 poin bila dibandingkan dengan kondisi Februari 2017 (mencapai 1,28 persen). Bila dibandingkan dengan Agustus 2017 pengangguran di Bali mengalami penurunan sebesar 0,62 poin (Agustus 2017 mencapai 1,48 persen).

Tabel 3.2.3

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Tahun 2017-2018

Kegiatan Utama	2017		Februari 2018
	Februari	Agustus	
1 Penduduk Usia Kerja	3.212.208	3.235.563	2.266.054
2 Angkatan Kerja	2.469.104	2.434.450	2.607.288
a. Bekerja	2.437.494	2.398.307	2.584.943
b. Menganggur	31.610	36.143	22.345
3 Bukan Angkatan Kerja	743.104	801.113	658.766
4 TPAK (%)	76,87	75,24	79,83
5 TPT (%)	1,28	1,48	0,86
6 Pekerja Tidak Penuh (<35 Jam)	635.294	550.541	606.812

Sumber : *BPS Provinsi Bali Tahun 2018, data diolah*



Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor- sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, pada Februari 2018 penduduk Bali paling banyak bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yang mencapai 19,74 persen (510.207 orang) dari total penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2017 sebesar 4,44 persen.

Jumlah yang bekerja di sektor pertanian di Februari 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen dibanding dengan Februari 2017. Sektor ini masih memiliki peranan yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mencapai 18,17 persen (469.721 orang).

Sektor Industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga memiliki peranan yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja. Penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan mencapai 440.296 orang (17,03 persen), sementara jumlah penduduk yang bekerja pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 13,26 persen (342.651 orang). Penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 6,74 persen dibandingkan dengan Februari 2017 (Februari 2017 mencapai 412.513 orang). Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan sebesar 23,70 persen dibandingkan dengan Februari 2017 (Februari 2017 mencapai 277.006 orang).

Meskipun sektor konstruksi termasuk dalam 5 sektor yang memberikan peranan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, namun pada Februari 2018 sektor ini mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan kondisi Februari 2017. Pada Februari 2017 penduduk yang bekerja pada sektor



konstruksi mencapai 194.535 orang sedangkan pada Februari 2018 penduduk yang bekerja di sektor konstruksi mencapai 164.912 orang atau turun sebesar 15,23 persen. Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tersaja pada Tabel :

Tabel 3.2.4
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2018

Lapangan Usaha	Februari 2017	Agustus 2018	Februari 2018
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	467.696	466.307	469.721
B Pertambangan dan Penggalian	4.526	6.536	5.400
C Industri Pengolahan	412.513	361.743	440.296
D Pengadaan Listrik dan Gas	2.659	5.406	3.729
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.018	5.514	4.143
F Konstruksi	194.535	179.134	164.912
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	488.517	485.573	510.207
H Transportasi dan Pergudangan	63.904	66.654	57.602
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277.006	295.291	342.651
J Informasi dan Komunikasi	8.369	10.429	15.438
K Jasa Keuangan dan Asuransi	57.903	58.175	64.622
L Real Estat	4.849	4.387	7.549
M,N Jasa Perusahaan	43.282	55.296	42.293
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	128.314	117.396	143.951
P Jasa Pendidikan	105.310	103.644	123.547
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.081	47.892	55.930
R,S,T,U Jasa Lainnya	134.012	128.930	132.952
Jumlah	2.437.494	2.398.307	2.584.943

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2018*

2.4.6 Jumlah Tenaga Kerja Yang Lulus Sertifikasi Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang memiliki posisi yang sangat strategis dibandingkan faktor-faktor pembangunan lainnya, seperti Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Kapital (SDK), serta Sumber Daya Buatan (SDB), karena manusia yang merencanakan, mengolah, menggunakan, menikmati, bahkan merusak atau menyalahgunakan ketiga faktor diatas. Semua



pembiayaan bagi SDM juga tidak hanya dianggap sebagai *labour cost*, tetapi sebagai nilai investasi (*human investment*), yang akan menghasilkan nilai tambah berlipat ganda jika dikelola dengan baik dan benar. Stagnansi atau bahkan kegagalan pencapaian sasaran pembangunan dimanapun, lebih disebabkan kegagalan dalam memposisikan peran dan fungsi SDM secara tepat dan maksimal.

Dalam memposisikan peran dan fungsi SDM secara tepat dan maksimal, maka Pemerintah menetapkan kebijakan sertifikasi kompetensi profesi, ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada berbagai status, seperti mereka yang sedang mengikuti dan lulus pendidikan formal dan pendidikan kejuruan, mereka yang mengikuti pendidikan dalam masyarakat (*community education*) yang jumlahnya sangat besar dimana mereka umumnya bekerja di sektor informal atau bekerja mandiri, mereka yang sedang bekerja di industry, yang karena kompetensinya yang rendah, tidak mampu mendapatkan fasilitas kerja layak (*decent work*), mereka yang sedang mencari pekerjaan di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri, keluaran/lulusan Pelatihan Kerja.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi kerja di dalam negeri/di luar negeri. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini realisasi capaian target pada indikator jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.5 Target dan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja yang lulus Sertifikasi Kompetensi.

NO	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Rentra (2018)	Capaian Akhir pada tahun 2018(%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Lulus Sertifikasi Kompetensi	150 orang	170 Orang	170 Orang	100	170 orang	100



Sumber : *Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, 2018*

Realisasi capaian target jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi kompetensi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sebesar 96 orang menjadi 150 orang di tahun 2017 (100,00 persen) dari target RPJMD sebesar 170 orang, peningkatan juga dicapai pada tahun 2018 sebesar 150 orang tenaga kerja yang lulus sertifikasi kompetensi. Sedangkan target akhir rentra tahun 2018 untuk jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi kompetensi adalah 170 orang sehingga capaian akhir pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Diharapkan dengan adanya dukungan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang memadai maka tahun berikutnya.

Permasalahan :

Kualitas tenaga kerja di Provinsi Bali terbilang sudah cukup baik. Namun, masih juga terdapat tenaga kerja dengan kualitasnya yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pendidikan, selain itu penyebab lainnya diantaranya terbatasnya fasilitas infrastruktur dan faktor-faktor lainnya.

a. Terbatasnya Fasilitas Infrastruktur

Terbatasnya fasilitas-fasilitas infrastruktur akan mengakibatkan produksi barang semakin rendah. Jika fasilitas infrastruktur atau alat yang hendak dipergunakan terbatas, tenaga kerja terpaksa memilih membuatnya dengan olahan tangan sendiri. Hal tersebut belum tentu beroleh hasil yang bermutu tinggi, sehingga daya saing barang produksi tersebut kalah banding dengan barang produksi daerah lain. Hal itulah yang menyebabkan kualitas tenaga kerja Bali semakin rendah

b. Tidak Menguasai Teknologi

Penguasaan teknologi bermakna mempunyai kemampuan untuk mengolah, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dengan optimal. Penguasaan teknologi juga sangat berpengaruh bagi kualitas tenaga kerja. Jika seorang tenaga kerja mempunyai penguasaan teknologi yang bagus, maka



produktifitasnya akan meningkat pesat dan lebih efisien. Sebaliknya, tenaga kerja yang tidak menguasai teknologi atau dapat disebut dengan istilah *gaptek* atau gagap teknologi akan lebih kecil produktifitasnya. Daya saing yang dimiliki oleh tenaga kerja yang gagap teknologi akan kecil.

c. Pendidikan yang Rendah

Di dalam pendidikan terdapat unsur pengembangan, peningkatan, dan pembinaan untuk senantiasa meningkatkan keterampilan, kepribadian, dan potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Pendidikan yang tidak sesuai standar akan sangat berpengaruh pada kehidupan individu. Jika usaha penyiapan tenaga kerja melalui pendidikan ini tidak berjalan optimal atau kualitasnya tidak sesuai, maka hasilnya adalah individu yang bermutu rendah. Kecakapan individu ini akan sangat kurang memadai jika ia menjadi tenaga kerja. Kecakapan seorang tenaga kerja pastinya berpengaruh pada daya jualnya di pasar tenaga kerja serta dalam produktifitasnya ketika menghasilkan barang dan jasa. Sayangnya, di Indonesia khususnya di Bali, masih banyak tingkat pendidikan tenaga kerjanya masih tergolong rendah.

Solusi :

1. Latihan Kerja

Latihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja. Dengan kata lain, latihan kerja berkaitan dengan pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu kerja, latihan kerja dapat berfungsi sebagai suplemen ataupun komplemen terhadap pendidikan formal.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan cara memperbaiki ataupun memantapkan sistem pendidikan di Indonesia khususnya di Bali. Pemerintah dapat membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berkualitas di seluruh daerah kabupaten Provinsi Bali.



3. Pemagangan

Pemagangan adalah latihan kerja langsung ditempat kerja. Jalur pemagangan ini bertujuan untuk memantapkan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Dengan bimbingan dan pengalaman yang terus-menerus dalam dunia kerja maka profesionalisme tenaga kerja akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keterampilan yang dipelajari selama magang pada suatu perusahaan.

2.2 Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya

Provinsi Bali dikenal sebagai pulau para dewata, karena memang kebanyakan masyarakat Bali menganut agama Hindu. Kepercayaan yang dipeluk masyarakat Bali juga menjadikan pulau Bali kaya dengan kebudayaan unik. Terlebih lagi, kebanyakan masyarakat Bali berkecimpung sebagai seniman lukis dan pahat. Selain seni lukis dan pahat, seni tari juga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara dan lokal. Pentingnya pelestarian nilai budaya, sejarah, dan warisan budaya dari generasi ke generasi manusia atau masyarakat berikutnya melalui proses pembudayaan (proses belajar budaya).

Sesuai dengan hakikat dan budaya sebagai milik bersama masyarakat, maka unsur-unsur kebudayaan, sejarah itu memasyarakatkan dalam individu-individu warga masyarakat dengan jalan diwariskan atau dibudayakan melalui proses belajar budaya. Proses pewarisan budaya dilakukan melalui proses enkulturasi (pembudayaan) dan proses sosialisasi (belajar atau mempelajari budaya).

Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan Peningkatan Pelestarian Budaya, Sejarah dan Warisan Budayanya. Berikut ini disampaikan pencapaian terhadap prioritas tersebut pada tabel berikut.



Tabel 3.2.6 Meningkatnya Pelestarian Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun Rens tra 2018	Capaian Akhir 2018 (%)
			Targ et	Reali sasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penciptaan Seni Kreasi Baru/Eksperimental	121,38	70	92	124,28	70	124,28

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2018

2.2.1 Jumlah Penciptaan Seni Kreasi Baru/Eksperimental

Pemerintah Provinsi Bali, sebagai upaya pelestarian seni budaya telah melaksanakan banyak kegiatan sebagai wadah ekspresi seniman menuju kesejahteraan, kemajuan dan keagungan peradaban Bali. Diberikan juga penghargaan kepada para seniman / budayawan sehingga mampu meningkatkan dan menumbuh kembangkan daya cipta dan kreasi seninya dalam upaya tetap menghasilkan karya seni yang berkualitas.

Penciptaan karya seni pada tahun 2018 hanya didukung oleh Kegiatan Pesona Budaya Provinsi Bali atau lebih dikenal dengan Bali Mandara Nawanatya, yang merupakan wadah berekspresi seniman-seniman muda inovatif yang dilaksanakan sepanjang tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 198 karya seni yang tercipta dari target sebanyak 280 karya seni, atau terealisasi sebesar 70,71%. Beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah karena Kegiatan Dukungan Penampilan Seni Budaya yang juga merupakan kegiatan pendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, serta kegiatan Parade Tari Nusantara yang batal dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran.

Jumlah peserta dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya hanya didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Seni Rupa, yang merupakan kegiatan workshop melukis Wayang Kamasan dilaksanakan di



Taman Budaya (Art Center) pada tanggal 23 Agustus 2018. Pada tahun 2018 sebanyak 50 peserta yang terlibat dari target sebanyak 150 peserta, atau hanya terealisasi sebesar 33,33%. Hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah karena anggaran yang dialokasi untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Seni Rupa sangat terbatas karena ketersediaan anggaran juga sangat terbatas.

Pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Kebudayaan sebagai Dinas yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan selalu berusaha untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan khususnya kesenian dalam upaya pelestariannya. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian, diantaranya Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya, serta Peragaan dan Pementasan Seni Budaya.

Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya merupakan kegiatan pelatihan seni tari, seni tabuh, seni lukis, dan seni sastra yang ditujukan untuk masyarakat umum, tidak dipungut biaya/gratis dan dilaksanakan setiap Hari Minggu di Taman Budaya Provinsi Bali. Pada Tahun 2018 kegiatan ini melibatkan sebanyak 850 orang yang berpartisipasi. Selain kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya dilaksanakan juga Kegiatan Peragaan dan Pementasan Seni Budaya (Bali Mandara Mahalango) yang pada tahun 2018 merupakan Bali Mandara Mahalango V. Pada Tahun 2018 kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 22 Juli sampai dengan 28 Agustus 2018, dan melibatkan sebanyak 71 sekaa/sanggar yang berpartisipasi.

Pada tahun 2018 sebanyak 921 orang/masyarakat/seniman yang mengapresiasi kesenian melalui kegiatan tersebut atau terealisasi sebesar 96,34%. Jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 2.686 orang/masyarakat/seniman yang mengapresiasi, dan telah terealisasi sebanyak 2.651 atau tingkat capaiannya sebesar 98,70%.



Permasalahan :

1. Munculnya fenomena-fenomena di media sosial terhadap kesenian Bali seperti misalnya jogged bungbung yang melecehkan dari pakem aslinya dan mengarah ke aksi yang negatif
2. Masih banyak sekaa/sanggar/seniman yang belum bisa ditampilkan pada event Pesta Kesenian Bali dan lain-lain, mengingat jumlah sekaa/sanggar/seniman yang tampil memang dibatasi karena alokasi anggaran serta waktu pelaksanaan.

Solusi :

1. Memperbanyak event-event pentas seni budaya, sehingga lebih banyak lagi sekaa/sanggar/seniman yang bisa ditampilkan, seperti misalnya pada tahun 2016 telah direncanakan sebuah event yaitu Gelar Seni Aksi Akhir Pekan “Bali Mandara Nawanatya” dimana dilaksanakannya direncanakan setiap akhir pekan (Hari Jumat, Sabtu dan Minggu).
2. Melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada sekaa/sanggar/seniman sehingga kesenian-kesenian yang ditampilkan dapat dijaga kualitasnya dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali
3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak, utamanya yang berkecimpung di bidang kebudayaan sehingga mendapatkan masukan yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

2.3 Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Terwujudnya pemerintahan yang baik merupakan upaya perubahan yang dilakukan untuk memosisikan birokrasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan konsisten guna melayani dan memberdayakan masyarakat, serta secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya.



Untuk itu arah perubahan reformasi birokrasi yang akan dicapai melalui penataan sistem manajemen pemerintahan haruslah bermuara pada perubahan mind set dan culture-set, sehingga mendorong munculnya kreativitas dan inovasi perbaikan kinerja pemerintah, peningkatan pelayanan publik, yang pada kelanjutannya akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Salah satu upaya mewujudkan hal di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Pemerintah Provinsi Bali sepakat menjalin kerjasama tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya pemberantasan korupsi di birokrasi. Kerjasama MenPAN dengan Provinsi Bali merupakan ruang strategis untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Korupsi, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, dan karena itu perlu diintensifkan upaya pencegahan. Penunjukan Bali sebagai *pilot project* pemberantasan korupsi, merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan.

Korupsi adalah tindakan pengabaian wewenang untuk keuntungan sendiri menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa ini. Pemerintah Provinsi Bali melalui program "Bali Mandara" telah melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, di antaranya melalui "simakrama" atau tatap muka untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, pembentukan unit pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE), pembentukan kantor pelayanan perizinan terpadu, membentuk kotak pos pusat pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi. Dengan simakrama dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, entah itu bersifat kritik atau masukan.

Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan Mewujudkan Kepemerintahan yang baiknya. Berikut ini disampaikan pencapaian terhadap prioritas tersebut pada tabel berikut.

Tabel 3.2.7 Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian akhir Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali	102,31	76	77,05	101,40	76	101,40
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	111,11	95%	100	105	95	105
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100	100	103,79	103,79	100	103,79



2.3.1 Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang ditunjukkan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap pengguna anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain diharapkan adanya perubahan paradigma dari hanya sekedar habisnya anggaran disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dana ke paradigma kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut :

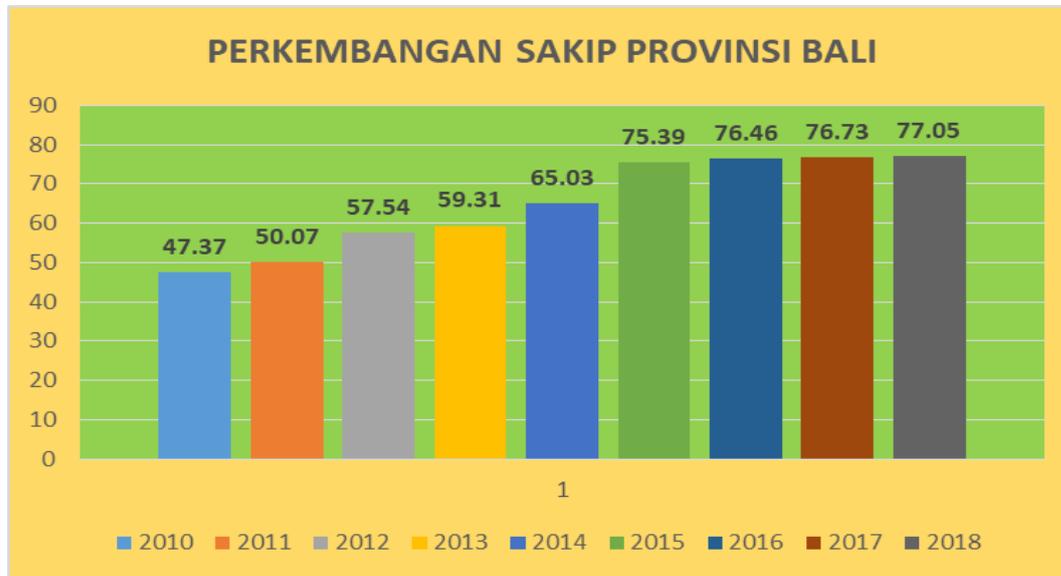
Tabel 3.2.8 Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali Tahun 2018

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
a.	Perencanaan Kinerja	35	25,12	25,20
b.	Pengukuran Kinerja	20	17,74	17,78
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,26	11,31
d.	Evaluasi Internal	10	8,33	8,38
e.	Capaian Kinerja	20	14,28	14,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,73	77,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 2018

Di bawah ini perkembangan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :

Grafik 3.9 Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Bali Tahun 2010 s.d. 2018



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 2018

Pemerintah Provinsi Bali telah berusaha mewujudkan pencapaian evaluasi yang lebih baik lagi dengan cara melalui pembinaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Bali telah berhasil meningkatkan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada Tahun 2016 nilai evaluasi yang sebelumnya masih terdapat Kabupaten/Kota dengan nilai 'CC' dan 'C', maka di Tahun 2017 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Wilayah II, Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperoleh peringkat pertama dengan nilai rata-rata **64,92** atau peringkat 'B', pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali berhasil mendorong Kota Denpasar ke predikat "BB" bersama Kabupaten Badung yang terlebih dahulu memperoleh predikat "BB".

Dalam pencapaian ini tentu masih terdapat permasalahan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/882/M.A.A.05/2018 :



Permasalahan :

1. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja di Tahun 2018. Perbaikan dilakukan dengan menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil serta indikator serta penyusunan pohon kinerja untuk menggambarkan hubungan kausalitas jenjang kerja;
2. Telah terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 413.580.245.833 dari program atau kegiatan yang tidak terkait dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja pada beberapa OPD. Hasil efisiensi anggaran digunakan untuk pembiayaan program atau kegiatan yang lebih strategis dalam pencapaian kinerja organisasi;
3. Tingkat pemahaman SAKIP pimpinan OPD belum merata sehingga mengakibatkan penerapan manajemen kinerja belum maksimal;
4. Aplikasi tentang pemantauan perkembangan capaian kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal karena pengisian dan monitoring hanya pada eselon II, selain itu aplikasi itu belum terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
5. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan menjadi perhatian oleh setiap OPD; dan
6. Pemerintah Provinsi Bali telah berperan untuk mendorong penguatan penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, sehingga perkembangan SAKIP Kabupaten/Kota mulai memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Solusi :

1. Menindaklanjuti perbaikan sasaran dan indikator kinerja serta pohon kinerja yang telah disusun sehingga mempunyai kualitas legalitas dan dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan dan penyelarasan dokumen perencanaan pada tingkat OPD;



2. Meningkatkan kualitas reviu dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja. Hasil reviu harus dapat memastikan bahwa anggaran digunakan untuk prioritas pembangunan sehingga program/kegiatan yang dijalankan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi pemantauan kinerja sehingga aplikasi ini dapat menjadi *tools* penerapan budaya kinerja di Pemerintah Provinsi Bali. Aplikasi tersebut diharapkan memudahkan manajemen untuk memonitor kinerja setiap individu dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Hal ini perlu ditambahkan adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, baik terkait dengan perencanaan, anggaran, kinerja maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun pegawai dalam penerapan manajemen kinerja;
4. Meningkatkan pemahaman setiap pimpinan OPD terhadap pentingnya penerapan SAKIP sehingga setiap pimpinan OPD memiliki *ownership* terhadap kinerja akan dicapai;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan penerapan SAKIP secara obyektif. Selain itu perlu meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi sehingga terdapat keyakinan bahwa OPD menyelesaikan saran dan rekomendasi yang diberikan; dan
6. Meningkatkan pembinaan SAKIP kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali agar terwujud kualitas implementasi SAKIP yang semakin baik di seluruh Provinsi Bali.

2.3.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Dan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tahun 2018 adalah 100 persen. Hal ini terlihat



dari target yang diharapkan 90 persen telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 100 persen. Pencapaian terhitung berdasarkan hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan data hasil pemutakhiran data selama tahun 2017. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 3.2.9 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Dan Eksternal yang Ditindaklanjuti.

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Prosentase
1	Persentase rekomendasi hasil pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti	95	100	105

Sumber : Inspektorat Provinsi Bali, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja* prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tahun 2018 adalah 105%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 95% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan data hasil pemutakhiran data selama tahun 2018 dengan perhitungan jumlah tindak lanjut dibagi jumlah rekomendasi x 100%.

Pada tahun 2018, dari hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi sebanyak 545 rekomendasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan selama tahun 2018, telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 545 rekomendasi (545 rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi 545 jumlah rekomendasi dikali 100% = 100%).

2.2.3 Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah

Dari tahun 2014 sampai dengan 2018 terjadi fluktuasi penerimaan pendapatan dari komponen pendapatan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi baik global maupun tingkat provinsi Bali. Adapun realisasi



pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.9 Perkembangan PAD Provinsi Bali Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	4.569.002.539.036,80	4.967.935.151.471,72	5.249.015.441.333,80	5.980.606.073.074,01	6.242.870.297.581,85
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.911.740.845.539,33	3.041.266.607.195,42	3.041.192.945.534,15	3.397.436.409.222,75	3.702.002.324.534,85
3	- Pajak Daerah	2.517.443.041.010,00	2.571.035.790.941,00	2.593.093.540.850,00	2.872.354.212.630,00	3.214.431.690.523,00
4	- Retribusi Daerah	71.677.645.698,00	59.851.354.001,00	63.858.566.092,00	46.032.543.415,84	47.389.506.113,00
5	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.612.312.079,02	105.276.390.717,25	172.937.261.957,00	187.896.455.521,00	170.219.137.368,48
6	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	130.199.804.041,47	170.791.011.567,00	236.316.683.046,73	284.005.848.060,93	269.961.990.530,37
7	Realisasi Dana Perimbangan	1.018.431.008.887,00	1.070.197.147.350,00	1.867.010.930.284,00	2.536.184.753.994,00	2.493.979.973.047
8	Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	638.830.684.610,47	856.471.396.926,30	340.811.565.515,65	47.173.909.192,26	46.888.000.000,00

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Tahun 2018*



Persentase peningkatan pendapatan daerah, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.10 Perkembangan Pendapatan Lainnya Provinsi Bali 2014 s.d 2018

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	4.569.002.539.0	4.967.935.15	5.249.015.441.	5.980.606.0	6.242.870.297.58
	36,80	1.471,72	333,80	73.074,01	1,85
Peningkatan		8,73%	5,66%	13,94%	4,39%

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.911.740.845.	3.041.266.60	3.041.192.945.5	3.397.436.409.2	3.702.002.324.5
	539,33	7.195,42	34,15	22,75	34,85
Peningkatan		4,45 %	(0,00) %	11,71 %	8,96 %

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Dana Perimbangan	1.018.431.008.88	1.070.197.14	1.867.010.930.2	2.536.184.75	2.493.979.973.0
	7,00	7.350,00	84,00	3.994,00	47
Peningkatan		5,08 %	74,75 %	35,84 %	-1,13 %

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	638.830.684.610,47	856.471.396.926,	340.811.56	47.173.909.	46.888.000.000,
		30	5.515,65	192,26	00
Peningkatan		34,07 %	-60,21 %	-86,16 %	-0,61 %

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Tahun 2018*

Pendapatan Daerah meningkat setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Akan tetapi peningkatan pendapatan daerah tidak lepas dari kontribusi komponen pendapatan daerah yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Peningkatan pendapatan daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 13,94%, yang diikuti kenaikan PAD sebesar



11,71%, dana perimbangan 35,84%, dan penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar -86,16%.

Permasalahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah :

1. Akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalance dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, sistem kontrol internal birokrasi yang sangat berlebihan dan sistem pilih kasih (*spoils system*) terutama dalam formasi dan mutasi pegawai yang dalam beberapa kasus mulai melibatkan tim sukses pejabat terpilih
2. Mental melayani belum tumbuh pada sebagian besar aparat. Mereka umumnya masih lebih suka dilayani daripada melayani masyarakat sehingga seringkali yang lebih dipikirkan terlebih dahulu adalah hasil yang akan diperoleh, bukan melaksanakan terlebih dahulu pekerjaannya atau menunjukkan kinerja terlebih dahulu
3. Aparatur pemerintah kurang kreatif dan masih sangat lemah dalam berinovasi. Mereka masih sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) sehingga bersifat serba rutin, dengan sedikit diskresi dan inovasi.

Solusi :

Mengembalikan peran birokrasi dari “mengendalikan” menjadi “mengarahkan” dan dari “memberi” menjadi “memberdayakan” Dengan demikian birokrasi yang kerap minta dilayani bisa berubah menjadi “alat pemerintah” yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat. Moto aparatur pemerintah sebagai abdi dan pelayan masyarakat semestinya dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik perlu dilakukan analisis beban kerja pada masing-masing dinas, bagian, biro dan seterusnya.

1. Mengubah sistem rekrutmen pegawai yang sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil system” dan “nepotism” , dengan “merit system”



atau “carrier system” sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir sudah ada kecenderungan perbaikan dalam sistem ini. Banyak pelamar dari kalangan masyarakat “biasa” yang bisa lulus tes penerimaan CPNS tanpa harus mengeluarkan biaya sogok untuk para calo. Sistem dan alat tes bisa terus diperbaiki untuk lebih menjamin objektivitas

2. Menjaga netralitas birokrasi terhadap kekuatan politik dan golongan yang dominan sehingga betul-betul bisa berperan secara objektif sebagai abdi negara dan masyarakat. Pengalaman masa lalu telah menunjukkan ketika birokrasi dikooptasi oleh satu kekuatan politik tertentu ia cenderung akan menjadi tidak adil dan diskriminatif.

2.4 Terwujudnya Pengaturan Tata Ruang Dan Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Alam

Menyikapi berbagai persoalan lingkungan hidup di Bali. Provinsi Bali telah mendeklarasikan program pengelolaan lingkungan dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif yaitu *Program Bali Green Province*. *Bali Green Province* adalah komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, swasta, LSM, Perguruan Tinggi, sekolah, Desa Pekraman dan seluruh komponen masyarakat Bali, dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, sehat, nyaman, lestari dan indah bagi generasi kini dan akan datang menuju tercapainya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera (Bali Mandara).

Tiga strategi utama untuk menjalankan program *Bali Green Province* yaitu:

- 1) *Green Culture* : Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk berbagai aktivitas keagamaan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar.
- 2) *Green Economy* : Mewujudkan perekonomian Daerah Bali yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dapat menjaga



kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan yang akan datang.

- 3) *Clean and Green* : Mewujudkan lingkungan hidup Daerah Bali yang bersih dan hijau, sehingga dapat terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam.

Respons terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Pendekatan struktural melalui pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi. Pendekatan non-struktural melalui pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi kebijakan, rencana dan program pembangunan, memperkuat kelembagaan serta anggaran; peningkatan kesadaran, kepedualian dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan ketaatan masyarakat terhadap lingkungan, mengembangkan kemitraan pengelolaan lingkungan dan pendidikan bermuatan lingkungan hidup.

Penduduk dan aktivitasnya merupakan sumber utama tekanan terhadap lingkungan hidup. Secara teoritis, tekanan lingkungan hidup berbanding lurus dengan jumlah penduduk serta penggunaan sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan dan dampak kerusakan dan/atau pencemaran yang ditimbulkan persatuan penggunaannya. Aktivitas pembangunan dalam sektor pariwisata di Provinsi Bali juga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penurunan jumlah lahan pertanian produktif akan boros lahan dan ketiadaan perlindungan terhadap sektor pertanian di Bali. Beberapa faktor yang menjadi pendorong semakin maraknya alih fungsi lahan produktif yaitu tidak terkontrolnya perluasan investasi lahan dan sumber daya alam dengan tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Bali, seperti : Hotel, Villa, lapangan golf, bisnis proferty, dan lain sebagainya. Serta menurunnya kualitas



dan kuantitas kawasan hutan, danau, daerah resapan maupun daerah aliran sungai sehingga menurunkan ketersediaan air.

Tabel 3.2.11 Terwujudnya Pengaturan Tata Ruang Dan Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Alam

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian Akhir 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ruang terbuka hijau per luas wilayah Kabupaten/Kota	n/a	21%	n/a	n/a	21%	n/a
2	Persentase pemenuhan parameter baku mutu air dan udara	100	15,70%	12.25%	100	15,70%	100
3	Persentase penurunan emisi GRK	100	2%	2%	100	2	100

2.4.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau Per Luas Wilayah Kabupaten/Kota

Bali *Green Province* merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Bali di bidang lingkungan hidup yang mencakup 3 (tiga) pilar yaitu *green culture*, *green economy*, *clean and green*.

Beberapa kegiatan yang telah terealisasi dalam program Bali *Green Province* antara lain:

1. *Green Culture*

- a. Bali telah menerima penghargaan 442 Sekolah Adiwiyata (29 Adiwiyata Mandiri, 75 Adiwiyata Nasional, 151 Adiwiyata Provinsi).



- b. Mendapat penghargaan 24 Kalpataru dalam Perintis, Pengabdian, Penyelamat, Pembina Lingkungan.
- c. Terbentuk 144 Desa Sadar Lingkungan.
- d. Telah terbangun 208 bank sampah tersebar di kabupaten/kota se-Bali serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R sebanyak 92 unit yang berfungsi untuk pengurangan produksi sampah anorganik ke TPA.

Kabupaten/ Kota	Bank Sampah (Unit)	TPST 3R (Unit)
Kota Denpasar	78	4
Kab. Tabanan	17	10
Kab. Badung	18	22
Kab. Jembrana	8	1
Kab. Gianyar	19	4
Kab. Klungkung	7	8
Kab. Bangli	2	1
Kab. Karangasem	20	14
Kab. Buleleng	39	28

- e. Pengembangan TPA regional di Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli dan pengelolaan sampah model sanitary landfill serta merencanakan pengembangan teknologi ramah lingkungan (*waste to energy*).

2. *Green Economy*

- a. Mengembangkan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) secara *voluntary* dan *mandatory* bagi perusahaan-perusahaan/ kegiatan yang kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan PROPER di 45 perusahaan, KLHS 8 dokumen, 350 izin lingkungan dan 35 pengaduan lingkungan.
- b. Mewajibkan setiap kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting dalam pembuangan limbah wajib membuat *sewage treatment plant* (STP). Hasil evaluasi menyatakan hampir 98% hotel yang berbintang 2 ke atas telah memiliki STP.



- c. Mengembangkan energi ramah lingkungan melalui pola kemitraan seperti pemasangan solar cell, pemanfaatan bahan bakar gas pada unit pembangkit listrik dan kendaraan bermotor.
 - d. Mewajibkan setiap pelaku usaha (Perseroan Terbatas) untuk mengkontribusikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) 2% dari keuntungan bersih (amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).
3. *Clean and Green*
- a. Penanaman pohon/ bibit tanaman langka/ upakara sebanyak 3.246 buah. Tanaman langka antara lain cempaka, albesia, mahoni, pala, klecung, juwet, sentul, kemiri, pangi.
 - b. Gerakan penanaman pohon 1 juta pohon bamboo (CSR KTI) yang berkelanjutan.
 - c. Pengembangan taman KEHATI (arboretum „Taman Gumi Banten“ dan „Taman USADA“) di 9 kab/kota yang berkelanjutan.
 - a. Pembuatan lubang biopori sebanyak 750.000 lubang tersebar di kabupaten/kota se-Bali.
 - b. Terbentuknya 38 desa kampung iklim.
 - c. Gerakan kebersihan dan penanaman pohon dalam rangka keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Desa Taro, Panglipuran, Grokgak, Pemuteran, Kintamani, Pura Samuan Tiga, Pura-Pura Pucak Padang Dewa, Desa Bebandem, Desa Sengkidu, Pura Pucak Tedung-Petang, Puran Kehen-Bukit Bangli, Pura Semut-Tampaksiring).
 - d. Telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan dilakukan sosialisasi terkait Pergub tersebut.
 - e. Kampanye *clean up beach* dan *clean and green* baik melalui panggung Bali Bebas Bicara, media elektronik, media cetak dan website.



2.4.2 Persentase pemenuhan parameter baku mutu air dan udara

Pencemaran adalah masuknya zat atau energy ke media lingkungan yang mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi menurun. Di Bali saat ini telah terjadi indikasi pencemaran ke media air terutama sungai-sungai lintas kabupaten maupun danau-danau yang merupakan kawasan strategis nasional. Tingkat pencemaran sudah melebihi baku mutu lingkungan, sehingga sungai maupun danau tidak mampu lagi mengabsorpsi buangan limbah yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga media air tidak mampu lagi memurnikan dirinya sebagai air baku untuk diminum.

Bali memiliki sungai 401 buah, diantaranya 162 sungai memiliki aliran menetap yaitu berair pada musim kemarau dan musim hujan dan 22 sungai merupakan sungai lintas kabupaten. Kondisi sungai lintas kabupaten pada umumnya telah mengalami tekanan yang cukup berat terutama di tengah dan di hilir, yang disebabkan oleh adanya pembuangan limbah komersial, domestic dan kegiatan pertanian, sehingga beberapa parameter seperti BOD, COD, amoniak, beberapa logam dan bakteri ecoli melampaui baku mutu air.

Sungai-sungai ini kewenangan pemantauannya dilakukan oleh provinsi. Di samping sungai, Bali juga memiliki 4 buah danau tersebar di Kabupaten Buleleng, Tabanan dan Bangli, yang memiliki fungsi sebagai cek dam yaitu pengalirannya melalui peresapan dalam bentuk mata air-mata air dan Laporan Kinerja BLH Provinsi Bali Tahun 2015 8 kondisinya 3 danau sudah mengalami tekanan seperti Batur, Beratan dan Buyan beberapa parameter mengalami peningkatan seperti BO, COD, pH, TSS, penggumpalan dan sedimentasi. Bila danau ini tidak dilakukan pengelolaan maka danau ini akan menjadi danau mati yaitu airnya tidak bisa berfungsi menjadi peruntukan diperkirakan 30 s.d 40 tahun danau ini akan mengalami degradasi fungsi.

Bali dengan luas yang relatif kecil memiliki panjang pantai seluas 430 km dan sebagian besar 181,3 km terindikasi mengalami abrasi, 87 km di antaranya rusak berat). Kondisi air pantai di kawasan-kawasan pariwisata di Bali sudah ada indikasi terjadinya pencemaran seperti amoniak, BOD, COD dan Fe, hal ini



diperkirakan disebabkan oleh aktifitas perhotelan, restoran dan kegiatan-kegiatan lain sehingga air pantai tidak mampu lagi melakukan self purification. Pada tahun 2017, pencemaran baku mutu air adalah 12,25 persen atau tingkat pencapaian 100 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 9,15 persen. Sehingga capaian sampai dengan 2017 terhadap 2018 adalah 100 persen dibandingkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan terhadap pencemaran baku mutu air sebesar 15,70 persen atau tingkat pencapaian 100 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 15,70 persen. Sehingga capaian Akhir 2018 sebanyak 100 persen.

2.4.3 Persentase penurunan emisi GRK

Kualitas udara di Bali pada umumnya relatif baik namun pada daerah-daerah tertentu seperti terminal, pusat-pusat pemukiman beberapa parameter kualitas udara mengalami penurunan. Hasil penelitian terhadap daerah-daerah yang padat lalu lintas, daerah pemukiman dan daerah pariwisata menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan dan kualitas udara terutama untuk parameter FM10, hal ini disebabkan karena beberapa aktifitas di dalam perkotaan yang secara nyata tidak pernah dilakukan penyiraman dan begitu juga terjadinya padat lalu lintas. Untuk daerah terminal pernah terjadi peningkatan parameter CO dan SO₂ hal ini disebabkan karena adanya pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor sehingga emisi gas buangnya melebihi baku mutu. Dampak dari meningkatnya FM10 akan menyebabkan terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) dan CO maupun SO₂ akan berdampak pada peningkatan hemoglobin darah yang menyebabkan terjadinya lemas dan syaraf terganggu.

Dengan meningkatnya aktifitas kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan lainnya berpotensi menghasilkan gas emisi ke udara. Masih beredar dan dimanfaatkannya refrigerant yang tidak ramah lingkungan (Bahan Perusak Ozon) pada pengguna pendingin ruangan, kulkas, dan sebagainya. Persentase penurunan emisi GRK Provinsi Bali tahun 2018 adalah 2 persen dengan tingkat capaian 100 persen.



Berdasarkan analisis baseline data dari tahun 2010 sampai dengan 2020 ditemukan bahwa total emisi kumulatif dari lima sector kegiatan (pertanian, kehutanan, energy, transportasi dan limbah) adalah sebesar 121.416.108 t CO₂-eq dengan total emisi setelah dilakukan mitigasi sebesar 106.495.534 t CO₂-eq. Dengan demikian jumlah emisi GRK yang dapat dikurangi hingga tahun 2020 diperkirakan sebesar 14.920.575 t CO₂-eq atau sebesar 12,29 persen. Fenomena tersebut membutuhkan berbagai program prioritas untuk meningkatkan upaya mitigasi terhadap GRK.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup tahun 2018 dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Bali sebagai berikut :

1. Masih rendahnya sosialisasi dan upaya gerakan aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim.
2. Kualitas air sungai, air laut, air danau dan mata air di beberapa lokasi di Bali telah terindikasi terjadi pencemaran oleh bahan-bahan organik dan anorganik yang ditunjukkan oleh terlampauinya baku mutu parameter BOD, COD, Phospat, Nitrat dan Total Coliform, serta meningkatnya intrusi air laut
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatnya emisi Gas Rumah Tangga (GRK) dan perusakan lapisan ozon.

Solusi dari permasalahan lingkungan di Bali :

1. Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati di tingkat Provinsi dan masing-masing Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD dan *stakeholders* terkait sebagai wadah untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan perencanaan secara terpadu dan komprehensif.
2. Melibatkan pimpinan OPD dan *stakeholders* terkait sebagai anggota Tim Koordinasi Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati dilengkti tugas dan tanggungjawab dari masing-masing anggota tim sehingga koordinasi dan



pengambilan keputusan dalam setiap tahapan dapat terlaksana dengan baik dan cepat.

3. Mengoptimalkan operasional P3SLH di Kabupaten/Kota se-Bali dengan sarana pendukungnya.
4. Melakukan Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai ketentuan yang berlaku
5. Membuka layanan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut sesuai pedoman yang berlaku dan dilakukan proses sebagaimana tercantum dalam Permen LH No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara penerapan sanksi administrasi.
6. Melakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali dilakukan rapat koordinasi dengan tim terkait di Provinsi dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan instansi penegak hukum yang ada diprovinsi Bali.

2.5 Terwujudnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Toleransi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama Serta Sistem Keamanan Yang Berstandar Internasional.

Sebagian besar penduduk Bali dan bahkan ribuan penduduk pendatang kehidupannya bertumpu/bergantung pada sector jasa pariwisata, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban kita semua baik pemerintah dan segenap komponen masyarakat secara sama ikut menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga secara otomatis dapat menstimulus berbagai sektor pertumbuhan ekonomi termasuk akan berpengaruh terhadap para investor untuk menanamkan modalnya di Bali, yang dapat menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi para pelaku ekonomi dan pelaku pariwisata yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk mengatasi pengangguran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali khususnya dan Indonesia umumnya.



Pembangunan untuk mewujudkan pengendalian penduduk, toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta system keamanan yang berstandar internasional khususnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah mutlak dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dinamis dimana masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha dapat melakukan aktifitas dengan aman dan nyaman. Untuk itu perlu dilakukan upaya antisipasi atas kejadiannya tindak criminal sebagai akibat ketatnya persaingan hidup, konflik sosial yang timbul karena adanya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Perlu diwaspadai dampak penduduk pndatang yang susah dikendalikan sehingga menimbulkan kerawanan sosial seperti bertambahnya pedagang kaki lima, gelandangan dan pengemis yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



Tabel 3.2.12 Terwujudnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Toleransi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama Serta Sistem Keamanan Yang Berstandar Internasional.

No	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun rens tra 2018	Capaian Akhir 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	100	21%	n/a	n/a	100	100
2	Total Fertility Rate (TFR)	100	15,70 %	12.25%	100	2,0	100

2.5.1 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi

- a. Prosentase Kasus pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi.

Kasus pelanggaran yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan (secara yustisi) pada tahun 2018 ditemukan sebanyak kasus 186 kasus, dan dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan 100 persen tanpa ada yang tertunda. Capaian kinerja tahun 2017 adalah sama dengan capaian tahun 2017 telah tercapai 100 persen, yaitu dari 225 kasus dan dari jumlah tersebut dapat diselesaikan secara yustisi pada tahun 2018 lebih rendah yaitu sebanyak 186 kasus sedangkan tahun 2017 sebanyak 225 kasus. Secara capaian kumulatif sampai tahun 2018 adalah sebesar 100 persen, sedangkan capaian akhir 2018 terhadap capaian 2018 adalah sebesar 100 persen.



Secara rata-rata jumlah penyelesaian kasus baik secara yustisi pada tahun 2018 lebih rendah di banding 2017, hal ini dikarenakan Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati Perda/Perkada selain pelaksanaan penegakan perda/perkada secara langsung juga secara kontinue melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat/pengusaha yang berpotensi melanggar Perda /Perkada. Untuk tahun 2018 telah diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap 210 orang dari 220 orang yang ditargetkan (97%) yang terdiri dari : masyarakat umum dan pengusaha seperti pramuwisata, siswa. pengusaha biro perjalanan wisata dan lainnya. Pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat Bali dihuni oleh penduduk yang heterogen dengan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami perkembangan/perubahan regulasi yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat baik dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 3.2.13 Target dan Capaian Kinerja 2018

NO	Indikator kinerja	Capaian 2017	2018			Target akhir tahun Rens tra 2018	Capaian Akhir trhdp 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah kasus Pelanggaran Perda/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	400%	200 Kasus	186 Kasus	107%	200 Kasus	101,4%
2	Jumlah kasus Pelanggaran Perda/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	394,2%	285 Kasus	357 Kasus	74,7%	285 Kasus	93,8%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, 2018



b. Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi :

543 kasus pelanggaran Perda yang terdiri dari : 186 kasus yustisi dan 357 kasus non yustisi masing-masing telah dapat diselesaikan 100 % tanpa ada yang tertunda. Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sama dengan capaian tahun 2017 telah tercapai 100 %, namun dari segi jumlah baik secara yustisi maupun non yustisi tahun 2018 sebanyak 543 kasus lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebanyak 522 kasus . Capaian kumulatif sampai tahun 2018 adalah sebesar 500 % atau sudah sesuai target telah tercapai 100%.

Penindakan secara Non Yustisi yaitu dengan memberikan peringatan dengan menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar perda. Dari 11 jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala daerah yang ditegakkan terdapat 543 jumlah penyelesaian kasus pelanggaran dengan rincian secara non yustisi 357 kasus dan secara yustisi 186 kasus. Pada table 3.4 disajikan data jumlah kasus pelanggaran perda yang telah diselesaikan baik pada tingkat yustisi maupun non yustisi sebagai berikut :



Tabel 3.2.14
Data Pelanggaran Perda Tahun 2018

No.	No.dan Tahun Perda	Tentang	Pelanggaran			Ket.
			Yustisi	Non Yustisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda No. 8 Tahun2000	Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas	24	72	96	3
2	Perda 1 Tahu 2010	UJPW	0	4	4	
3	Perda 10 Tahun2011	KTR	48	69	117	2
4	Perda 6 Tahun 2014	Perlindungan anak	0	6	6	
5	Pertda 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan	22	18	40	4
6	Perda No.5 Tahun 2016	Pramuwisata	91	28	119	1
7	Perda 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengellolaan Lingkungan Hidup	0	19	19	
8	Perda 4 Tahun2017	Pertambangan Mineral Bukan Logam	0	4	4	
9	Perkab No.2 Tahun 2012	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	124	124	
10	PerKot.Denpasar No.1 Th.2015	Trantibum	1	0	1	
11	Pergub No.5 Tahun2016	Perijinan Air Tanah	0	13	13	
	j u m l a h	:	186	357	543	

Sumber : Satpol PP Prov.Bali, 2018.

2.5.3 Total Fertility Rate (TFR)

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk yang bertambah dengan pesat. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ketahun semakin bertambah jumlahnya. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun dimana angka idealnya adalah di bawah 1(satu) persen. Pertumbuhan penduduk yang terlalu besar sebagai penyebab dari hampir semua masalah ekonomi dan sosial di dunia. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dinyatakan sebagai penyebab utama kemiskinan, rendahnya taraf



hidup, kurang nutrisi, kesehatan buruk, kerusakan lingkungan hidup, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dalam Nuryati (2015) terjadi trend penurunan Angka Fertilitas Total atau Total Fertility Rate (TFR) dari tahun 1994 sebesar 2,9 anak per wanita menjadi 2,8 anak per wanita pada tahun 1997, namun pada tahun 2003 menjadi 2,6 dan angka ini stagnan sampai tahun 2012. Angka ini masih tergolong tinggi sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan TFR ini secara nasional. TFR Provinsi Bali pada tahun 1994 menunjukkan angka 2,14 anak per wanita dan pada tahun 1997 menjadi 2,12 anak per wanita. Pada tahun 2003 hingga 2007 TFR di Provinsi Bali sebesar 2,10 anak per wanita, akan tetapi meningkat menjadi 2,30 anak per wanita pada tahun 2012. Angka ini melibihi target Millennium Development Goals (MDG's) yang menargetkan angka 2,1 anak per wanita untuk pengendalian penduduk stabil.

Tabel di bawah menunjukkan Tingkat Kelahiran menurut Umur atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan TFR kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dilakukan oleh Susenas pada tahun 2010.

Tabel 3.2.15 Nilai ASFR dan TFR Kabupaten/ Kota, Provinsi Bali Tahun 2010

Kab/Kota	ASFR							TFR (anak per wanita)
	15-19 (jiwa)	20-24 (jiwa)	25-29 (jiwa)	30-34 (jiwa)	35-39 (jiwa)	40-44 (jiwa)	45-49 (jiwa)	
Jembrana	41	183	116	100	48	10	1	2.50
Tabanan	29	160	139	62	40	8	3	2.20
Badung	13	149	162	109	32	7	5	2.39
Gianyar	17	122	148	89	33	12	2	2.11
Klungkung	14	150	151	119	37	29	0	2.50
Bangli	86	192	134	91	63	22	6	2.97
Karang Asem	46	217	132	103	47	22	5	2.86
Buleleng	26	140	166	91	42	12	3	2.45
Denpasar	17	75	134	110	48	7	7	1.99

Sumber : Susenas 2010, Diolah



Tabel diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Bali, angka TFR tertinggi berada pada Kabupaten Bangli yakni 2,97 anak per wanita dan yang paling rendah adalah Kota Denpasar yakni sebesar 1,99 anak per wanita. ASFR tertinggi pada umur 15-19 tahun berada pada Kabupaten Bangli. Hal tersebut menunjukkan kelahiran yang terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 86 jiwa per seribu wanita yang berarti usia kawin pertama di daerah tersebut rendah.

Permasalahan yang terjadi mengenai pengendalian pertumbuhan penduduk, toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta sistem keamanan yang berstandar internasional adalah :

1. Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada. Perangkat Daerah selaku leading sector (inisiator) Perda/Perkada kurang proaktif dalam mensosialisasikan Perda/Perkada kepada masyarakat.
2. Masih banyaknya tingkat urbanisasi dari luar Provinsi Bali dan penyebaran penduduk masih tidak merata yang hanya berpusat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dan tututan ekonomi, gaya hidup yang semakin tinggi sehingga memicu tingkat kriminalitas meningkat.
3. Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada. Perangkat Daerah selaku leading sector (inisiator) Perda/Perkada kurang proaktif dalam mensosialisasikan Perda/Perkada kepada masyarakat.

Solusi :

1. Pemerintah Provinsi Bali secara proaktif melaksanakan koordinasi dengan : instansi terkait perangkat daerah khususnya inisiator Perda, meningkatkan koordinasi / sinergitas Satpol PP Kabupaten/ Kota se Bali serta terus berupaya mempelajari serta memahami aturan –aturan yang dimuat dalam



Perda/Perkada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dilapangan

2. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha termasuk melalui pembinaan dan pengawasan, serta secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kompetensi aparatur Pol PP sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

2.6 Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan

Pada bulan November tahun 2018 terjadi peningkatan kunjungan wisman ke Bali dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian realisasinya sebesar 6.027.159 orang. Dibandingkan dengan tahun 2017, ada peningkatan kunjungan yang sebelumnya pada Tahun 2017 sebanyak 5.697.739 orang..

Table berikut ini menunjukkan capaian berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.2.16 Berkembangnya Kepariwisataan Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian Akhir Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	129.49	4.600.000	6.027.159	131.02	4.600.000	131,02



2.6.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali pada bulan Desember 2018 tercatat mencapai 498.819 kunjungan. Angka ini naik sebesar 22,64 persen dibandingkan dengan catatan bulan November 2018 (m to m). Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2017 (y on y) jumlah kunjungan wisman mengalami peningkatan sebesar 57,90 persen. Pada bulan Desember 2018, sebagian besar wisman ke Bali datang melalui bandara, yaitu sebanyak 495.641 kunjungan, sedangkan yang datang melalui pelabuhan laut sebesar 3.178 kunjungan. Dibandingkan dengan catatan bulan yang sama tahun 2017 (y on y), jumlah wisman yang datang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai naik sebesar 61,28 persen. Bila dibandingkan dengan catatan bulan November 2018 (m to m), kunjungan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di bulan Desember 2018 juga tercatat meningkat sebesar 21,88 persen. Wisman yang datang melalui pelabuhan laut pada bulan Desember 2018 turun hingga -62,99 persen dibandingkan bulan Desember 2017 (y on y). Jika dibandingkan dengan bulan November 2018 (m to m), kunjungan wisman yang datang melalui pelabuhan laut mengalami peningkatan hingga ribuan persen. Hal ini diduga terkait adanya kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa.

Tabel 3.2.17 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk Denpasar 2017, November 2018 dan Desember 2018

No	Pintu Masuk	Desember 2017	November 2018	Desember 2018	Perubahan (%)		Peran Thd Total
					Des 2018 thd Nov 2018	Des 2018 thd Des 2017	
1	Bandara	307.321	406.679	495.641	21,88	61,28	99,36
2	Pelabuhan	8.588	46	3.178	6.808,70	-62,99	0,64
Jumlah		315.909	406.725	498.819	22,64	57,90	100,00

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018



Tabel 3.2.18 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Desember 2017, November 2018 dan Desember 2018

No	Kebangsaan	Wisman Desember 2018				Wisman November 2018	Wisman Desember 2017	Perubahan Wisman Des 2018 Thd Nov 2018 (%)	Perubahan Wisman Des 2018 Thd Des 2017 (%)
		Pintu Masuk		Total	Persen tase (%)				
		Bandara	Pelabuhan Laut						
1	Australia	101.787	4	101.791	20,41	87.260	79.222	16,65	28,49
2	Tiongkok	80.447	4	80.451	16,13	73.793	11.530	9,02	597,75
3	India	33.665	0	33.665	6,75	28.629	29.123	17,59	15,60
4	Malaysia	24.184	0	24.184	4,85	16.209	15.585	49,20	55,17
5	Singapura	23.564	0	23.564	4,72	12.731	13.971	85,09	68,66
6	Amerika Serikat	22.773	2	22.775	4,57	18.948	13.245	20,20	71,95
7	Jepang	22.751	0	22.751	4,56	19.317	15.304	17,78	48,66
8	Inggris	19.602	3	19.605	3,93	16.686	15.170	17,49	29,24
9	Rusia	14.321	1	14.322	2,87	8.478	9.501	68,93	50,74
10	Korea Selatan	13.987	0	13.987	2,80	11.663	6.661	19,93	109,98
11	Lainnya	138.560	3.164	141.724	28,41	113.011	106.597	25,41	32,95
Total		495.641	3.178	498.819	100,00	406.725	315.909	22,64	57,90

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

Menurut kebangsaan, wisman yang tercatat paling banyak datang ke Bali pada bulan Desember 2018 adalah wisman dengan kebangsaan Australia (20,41 persen), Tiongkok (16,13 persen), India (6,75 persen), Malaysia (4,85 persen), Singapura (4,72 persen), Amerika Serikat (4,57 persen), Jepang (4,56 persen), Inggris (3,93 persen), Rusia (2,87 persen), dan Korea Selatan (2,80 persen).

Dibandingkan dengan bulan November 2018 (*m to m*), dari sepuluh negara dengan jumlah wisman terbanyak, seluruh negara mengalami peningkatan dengan peningkatan yang cukup tinggi berasal dari Singapura sebesar 85,09 persen, disusul oleh wisman dari Rusia yang mengalami peningkatan sebesar 68,93 persen dan Malaysia sebesar 49,20 persen. Peningkatan secara umum diduga karena bertepatan dengan perayaan tahun baru 2019. Jika dibandingkan dengan Desember 2017 (*y on y*), seluruh negara utama asal wisman mengalami peningkatan jumlah wisman, dengan peningkatan tertinggi hingga ratusan persen dicapai wisman yang berasal dari Tiongkok (597,75 persen) dan Korea Selatan (109,98 persen).



Tabel 3.2.19 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Januari-Desember 2018

No.	Kebangsaan	Wisman Januari – Desember 2018				Wisman Jan – Des 2017 (Orang)	Perubahan Wisman Jan – Des 2018 Thd Jan – Des 2017
		Bandara (Orang)	Pelabuhan (Orang)	Total (Orang)	Persentase (%)		
1	Tiongkok	1.361.326	186	1.361.512	22,43	1.385.850	-1,76
2	Australia	1.155.240	13.975	1.169.215	19,26	1.094.974	6,78
3	India	352.652	1.242	353.894	5,83	272.761	29,75
4	Inggris	267.210	3.579	270.789	4,46	243.827	11,06
5	Jepang	260.246	1.420	261.666	4,31	252.998	3,43
6	Amerika Serikat	231.682	4.896	236.578	3,90	191.106	23,79
7	Perancis	195.657	77	195.734	3,22	177.864	10,05
8	Malaysia	192.529	2.231	194.760	3,21	170.459	14,26
9	Jerman	185.243	620	185.863	3,06	177.184	4,90
10	Singapura	141.543	3.006	144.549	2,38	125.934	14,78
11	Lainnya	1.683.831	12.082	1.695.913	27,94	1.604.782	5,68
Jumlah		6.027.159	43.314	6.070.473	100,00	5.697.739	6,54

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

Secara kumulatif, jumlah wisman yang datang langsung ke Bali selama tahun 2018 tercatat mencapai 6.070.473 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 (*y on y*) yang tercatat mencapai 5.697.739 orang, atau naik sebesar 6,54 persen. Kunjungan wisman selama tahun 2018 didominasi oleh wisman asal Tiongkok (22,43 persen), Australia (19,26 persen), India (5,83 persen), Inggris (4,46 persen), Jepang (4,31 persen), Amerika Serikat (3,90 persen), Perancis (3,22 persen), Malaysia (3,21 persen), Jerman (3,06 persen), dan Singapura (2,38 persen).

Negara yang mengalami peningkatan jumlah wisman terbesar selama tahun 2018 berasal dari India, yaitu tercatat sebesar 29,75 persen. Hal ini diduga terkait dibukanya penerbangan langsung Denpasar-Mumbai. Sementara wisman asal Tiongkok mengalami penurunan hingga -1,76 persen. Hal ini diduga terkait terbongkarnya kasus praktek mafia perjalanan wisata dari Tiongkok pada bulan Oktober 2018.

Tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2018 tercatat mencapai 57,62 persen, meningkat 1,70 poin dibandingkan TPK



hotel bintang pada bulan November 2018 (*m-to-m*) yang mencapai 55,92 persen. Kabupaten Badung tercatat mencapai TPK tertinggi sebesar 59,38 persen, dan terendah tercatat di Kabupaten Karangasem yaitu 32,93 persen. Jika dibandingkan dengan bulan November 2018, TPK hamper seluruh Kabupaten mengalami peningkatan kecuali untuk Kabupaten Karangasem yang mengalami penurunan nilai TPK hingga -1,30 poin. Peningkatan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gianyar sebesar 3,63 poin.

Tabel 3.2.20 TPK Pada Hotel Berbintang di Bali Menurut Kabupaten/Kota November 2018 dan Desember 2018

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) (%)		Perubahan (Poin)
		November 2018	Desember 2018	
1	Badung	58,11	59,38	1,27
2	Gianyar	44,70	48,32	3,63
3	Karangasem	34,23	32,93	-1,30
4	Buleleng	34,99	37,13	2,14
5	Denpasar	55,78	56,93	1,15
	Bali	55,92	57,62	1,70

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

Tabel 3.2.21 TPK Menurut Klasifikasi Bintang di Bali November 2018 dan Desember 2018

No.	Klasifikasi Bintang	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) (%)		Perubahan (Poin)
		November 2018	Desember 2018	
1	Bintang 1	37,61	45,60	7,99
2	Bintang 2	51,17	56,30	5,13
3	Bintang 3	52,18	55,96	3,78
4	Bintang 4	62,19	61,15	-1,03
5	Bintang 5	54,81	56,45	1,64
	Seluruh Bintang	55,92	57,62	1,70

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tahun 2018

Menurut klasifikasi hotel, tingkat penghunian kamar hotel bintang empat sebesar 61,15 persen, merupakan TPK hotel bintang tertinggi dibandingkan dengan kelas hotel yang lain. TPK hotel bintang terendah tercatat pada hotel bintang satu yang hanya mencapai 45,60 persen. Bila dibandingkan dengan bulan November 2018, TPK hotel bintang menurut kelas hotel mengalami



peningkatan kecuali pada kelas hotel bintang empat yang mengalami penurunan mencapai -1,03 poin.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2018 tercatat mencapai 2,81 hari. Angka ini turun - 0,23 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada bulan November 2018 (*m to m*) yang mencapai 3,04 hari. Secara keseluruhan, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada bulan Desember 2018 selama 2,34 hari, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama menginap tamu asing yang selama 3,17 hari.

Menurut kabupaten/kota, tercatat rata-rata lama menginap tamu terlama pada bulan Desember 2018 di Kabupaten Karangasem yaitu selama 3,11 hari dan terendah di Kabupaten Buleleng, yaitu selama 1,75 hari.

Tabel 3.2.22 Rata-rata Lama Menginap Tamu asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di Bali November 2018 dan Desember 2018.

No.	Klasifikasi Bintang	Rata-rata Lama Menginap Tamu (Hari)					
		Asing		Indonesia		Total	
		November 2018	Desember 2018	November 2018	Desember 2018	November 2018	Desember 2018
1	Bintang 1	2,75	3,14	2,68	2,16	2,74	2,97
2	Bintang 2	3,79	3,51	1,85	1,84	2,70	2,46
3	Bintang 3	3,30	3,34	2,25	2,18	2,76	2,67
4	Bintang 4	3,33	3,23	2,63	2,28	3,07	2,83
5	Bintang 5	3,21	2,92	4,33	3,77	3,45	3,11
	Seluruh Bintang	3,30	3,17	2,61	2,34	3,04	2,81

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018



Tabel 3.2.23 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di Bali Menurut Kabupaten/Kota, November 2018 dan Desember 2018.

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Menginap Tamu (Hari)					
		Asing		Indonesia		Total	
		November 2018	Desember 2018	November 2018	Desember 2018	November 2018	Desember 2018
1	Badung	3,36	3,12	2,75	2,44	3,16	2,84
2	Gianyar	2,69	2,61	3,93	3,13	2,79	2,66
3	Karangasem	2,49	3,31	1,46	1,76	2,41	3,11
4	Buleleng	2,38	3,08	1,20	1,34	1,67	1,75
5	Denpasar	3,50	3,96	2,54	2,26	2,90	2,87
	Bali	3,30	3,17	2,61	2,34	3,04	2,81

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2018

Seiring bertambah pesatnya perkembangan industri kepariwisataan di Bali, muncul berbagai permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh semua stakeholders karena berdampak pada kemajuan dan perkembangan pariwisata di Bali untuk kedepannya, permasalahan yang telah terjadi di Bali adalah

1. Permasalahan transportasi yang berupa kemacetan, masalah tempat parkir, abrasi pantai, pencemaran air dan kerusakan terumbu karang.
2. Sampah dan masalah kebersihan di Bali sering kali menjadi keluhan utama para wisatawan di pulau dewata kita.
3. Fasilitas Pendukung Obyek Wisata masih kurang seperti Toilet Umum.

Solusi dari permasalahan :

1. Masalah sampah bukan menjadi permasalahan Provinsi Bali akan tetapi menjadi permasalahan Nasional akan tetapi pada pertengahan Tahun 2018 Provinsi Bali memiliki Gubernur Bali, Kebijakan untuk mengurangi Sampah Plastik Pemerintah Provinsi Bali membuat Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai, peraturan ini berlaku ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, peraturan ini juga mewajibkan minimarket, supermarket dan tempat belanja lainnya di wilayah provinsi bali melarang penggunaan kantong belanja plastik, konsumen diwajibkan membawa kantong belanjanya sendiri.



2. Guna melancarkan moda transportasi diprovinsi bali, dengan Pemerintahan Provinsi Bali yang baru, Pemerintah Provinsi Bali telah membuat shot cut Denpasar- Singaraja dan pembangunan Bandara Bali Utara, ini adalah rencana Pemerintah pemeratakan perekonomian tidak terpusat satu titik.
3. Mengatasi kemacetan dengan cara membangun fasilitas umum seperti pengadaan angkutan massal, pengembokan kendaraan yang melanggar (parkir tidak pada tempatnya).
4. Penataan pantai/penanganan abrasi sepanjang 40 km, pelestarian dan penanaman hutan mangrove, dan penertiban sempadan pantai.

2.7 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Bali

Sub sektor pertanian tanaman pangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional maupun regional, yakni sebagai penghasil bahan pangan pokok, penyediaan bahan baku industri, menyediakan lapangan pekerjaan, untuk pelestarian sumberdaya alam dan nilai-nilai sosial budaya serta lingkungan hidup. Untuk itu strategi dan kebijakan pertanian tanaman pangan diarahkan guna memantapkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Berdasarkan sasaran pertanian tersebut di atas, serta berpedoman pada Renstra Provinsi Bali dan RPJM Daerah Provinsi Bali, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan kinerja, antara lain Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.



Tabel 3.2.24 Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian akhir Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	88,88	119,27	103,87	87,18	119,27	87,18
2	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	126.58	11,60	14,50	125	11,60	125

2.7.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Pembangunan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek produksi dan ketersediaan pangan, aspek distribusi dan stabilitas harga serta aspek konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk pengembangan sentra produksi dan menurunkan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu, daya saing dan pemasaran produk pertanian dimana lahan pertanian yang sempit di daerah Bali dan adanya alih fungsi lahan, maka perlu ada pengutuhan sentra-sentra produksi terutama komoditas-komoditas unggulan Bali, antara lain seperti tanaman mangga, manggis, jeruk, pisang, sayuran dan lain-lain.

Kemudian pembinaan dan pengembangan sub sistem hillir dari program pengembangan agribisnis meliputi penanganan panen dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pembinaan kelembagaan pertanian. Pengembangan panen,



pasca panen, dan pengolahan hasil dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

NTP (*Farmers Term of Trade*) merupakan salah satu indikator proksi untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk biaya produksi usaha pertaniannya maupun untuk konsumsi rumahtangganya. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi indeks NTP, secara relatif semakin kuat pula peranannya pada tingkat kemampuan/daya beli petani.

Menuju penghujung tahun 2017, pada bulan Desember indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat mengalami penurunan sebesar 0,56 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 104,51 menjadi 103,93. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga barang-barang hasil produksi pertanian yang lebih kecil daripada kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima petani dari hasil pertaniannya (It) mencapai 130,64 naik 0,07 persen dibandingkan bulan November 2017 sebesar 130,55. Sedangkan Indeks yang dibayar petani Desember 2017 tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen dari 124,91 di bulan November menjadi 125,70.

Pada bulan Desember 2018, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 103,15 menjadi 103,87. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) yang lebih besar daripada kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dibayar oleh petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) mencapai 136,40 naik 1,74 persen dibandingkan bulan November 2018 yang besarnya 134,06. Sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) Desember 2018 tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen dari 129,96 di bulan November menjadi 131,32. Beberapa komoditas tercatat mengalami



kenaikan harga cukup tinggi mulai harga di produsen maupun di konsumen. Kenaikan ini diduga disebabkan oleh hari raya Natal dan hari raya Galungan yang jatuh hampir bersamaan serta adanya liburan panjang di akhir tahun yang mendorong naiknya permintaan.

Indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) pada bulan Desember 2018 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 99,09 menjadi 99,40 atau naik sebesar 0,31 persen. Indeks harga yang diterima petani (It) subsektor tanaman pangan tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen, yang disebabkan oleh naiknya rata-rata harga pada kelompok padi sebesar 1,47 persen dan palawija sebesar 1,61 persen. Kenaikan secara umum terjadi di beberapa komoditas, yaitu gabah, ketela pohon/ubi kayu, kacang kedelai, dan ubi jalar. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan yang lebih rendah, yaitu sebesar 1,19 persen, yang dipengaruhi oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga sebesar 1,39 persen dan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,22 persen.

Indeks NTP Subsektor Hortikultura (NTP-H) pada bulan Desember 2018 tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,48 persen, dari 99,71 menjadi 101,18. Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 2,41 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan lebih kecil, yaitu sebesar 0,92 persen. Kenaikan indeks harga yang diterima petani disebabkan oleh naiknya indeks harga di semua kelompok. Kenaikan harga paling tinggi tercatat kelompok buah-buahan, yaitu 2,97 persen disusul kelompok sayur-sayuran dan tanaman obat masing-masing sebesar 1,36 persen dan 0,93 persen. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan harga, di antaranya jeruk, pisang, cabai merah, tomat, wortel, bawang merah. Sementara itu kenaikan pada indeks yang dibayar petani (Ib), disebabkan oleh naiknya indeks harga barang konsumsi rumah tangga petani sebesar 1,17 persen dan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,17 persen.



Indeks NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) pada bulan Desember 2018 tercatat menurun, sedalam 1,39 persen dari 93,19 menjadi 91,90. Penurunan ini dipicu oleh turunnya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,35 persen, dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) tercatat meningkat 1,06 persen. Komoditas hasil perkebunan yang mengalami penurunan harga tercatat pada komoditas kakao dan cengkeh. Sementara itu, kenaikan Ib di sebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks BPPBM masing – masing sebesar 1,20 persen dan 0,57 persen.

Subsektor Peternakan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ternak. Indeks NTP Subsektor Peternakan (NTP-Pt) pada bulan Desember 2018 tercatat mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu 1,70 persen, dari 116,08 menjadi 118,06. Kenaikan ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (It) yang naik 2,73 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik lebih kecil, yaitu 1,01 persen. Kenaikan It dipengaruhi oleh naiknya rata-rata harga pada semua kelompok di atas 2 persen. Kelompok ternak besar naik 2,89 persen, unggas 2,83 persen, ternak kecil 2,49 persen, dan hasil ternak 2,24 persen. Komoditas peternakan yang harganya tercatat meningkat, yaitu sapi potong, babi, telur ayam ras, dan ayam ras pedaging. Di sisi lain, kenaikan pada indeks harga yang dibayar (Ib) dipengaruhi oleh naiknya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 1,23 persen dan 0,80 persen.



Tabel 3.2.25 Indeks Tukar Petani Provinsi Bali dan Perubahannya Menurut Subsektor November 2018-Desember 2018 (2012=100)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	November 2018	Desember 2018	
1. Tanaman Pangan (NTP-P)	99,09	99,40	0,31
a. Indeks Diterima Petani	133,04	135,05	1,51
- Padi	128,29	130,18	1,47
- Palawija	146,92	149,28	1,61
b. Indeks Dibayar Petani	134,26	135,86	1,19
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	135,66	137,55	1,39
- Indeks BPPBM	127,80	128,08	0,22
2. Hortikultura (NTP-H)	99,71	101,18	1,48
a. Indeks Diterima Petani	130,63	133,78	2,41
- Sayur-sayuran	145,03	147,01	1,36
- Buah-buahan	124,19	127,88	2,97
- Tanaman Obat	133,42	134,66	0,93
b. Indeks Dibayar Petani	131,01	132,21	0,92
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	134,22	135,79	1,17
- Indeks BPPBM	122,30	122,51	0,17
3. Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	93,19	91,90	-1,39
a. Indeks Diterima Petani	121,71	121,29	-0,35
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	121,71	121,29	-0,35
b. Indeks Dibayar Petani	130,60	131,99	1,06
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	135,66	137,29	1,20
- Indeks BPPBM	115,41	116,06	0,57
4. Peternakan (NTP-Pt)	116,08	118,06	1,70
a. Indeks Diterima Petani	145,89	149,88	2,73
- Ternak Besar	147,08	151,33	2,89
- Ternak Kecil	155,85	159,73	2,49
- Unggas	138,73	142,66	2,83
- Hasil Ternak	126,85	129,70	2,24
b. Indeks Dibayar Petani	125,68	126,95	1,01
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	135,10	136,76	1,23
- Indeks BPPBM	117,42	118,36	0,80
5. Perikanan (NTP-Pi)	103,59	102,70	-0,86
a. Indeks Diterima Petani	136,12	136,29	0,13
- Tangkap	150,32	150,35	0,02
- Budidaya	115,07	115,45	0,33
b. Indeks Dibayar Petani	131,40	132,71	0,99
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	140,10	142,03	1,38
- Indeks BPPBM	114,63	114,71	0,07
NTP Gabungan	103,15	103,87	0,70
a. Indeks Diterima Petani	134,06	136,40	1,74
b. Indeks Dibayar Petani	129,96	131,32	1,04
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	135,21	136,90	1,25
- Indeks BPPBM	120,34	120,89	0,45

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Prov. Bali Tahun 2018



Pada bulan Desember 2018, Indeks NTP gabungan secara nasional tercatat 103,16 dengan kenaikan sebesar 0,04 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) nasional yang naik sebesar 0,54 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) tercatat mengalami kenaikan yang lebih rendah, yaitu 0,50 persen.

Tabel 3.2.26 Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional serta Pesentase Perubahannya, November 2018-Desember 2018 (2012=100)

Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	November 2018	Desember 2018	%	November 2018	Desember 2018	%
Indeks yang Diterima Petani	134,06	136,40	1,74	137,42	138,16	0,54
Indeks yang Dibayar Petani	129,96	131,32	1,04	133,26	133,93	0,50
NTP	103,15	103,87	0,70	103,12	103,16	0,04

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Prov. Bali Tahun 2018

Indeks Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dengan komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dari komponen Ib, Indeks NTUP dapat lebih mencerminkan margin usaha pertanian, karena yang dibandingkan hanya harga hasil produksi dengan biaya produksinya.

Kondisi NTUP Desember 2018, tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen, dari 111,40 pada bulan sebelumnya menjadi 112,83. Kenaikan indeks NTUP tercatat pada empat subsektor. Kenaikan tertinggi tercatat pada subsektor hortikultura sebesar 2,24 persen, disusul peternakan 1,92 persen, tanaman pangan 1,29 persen dan perikanan 0,06 persen. Sebaliknya NTUP subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat mengalami penurunan sebesar 0,91 persen. Sementara itu, jika dilihat NTUP subsektor perikanan lebih rinci, terlihat bahwa NTUP perikanan tangkap tercatat menurun sebesar 0,07 persen, sebaliknya NTUP perikanan budidaya naik sebesar 0,30 persen. Informasi Indeks NUTP secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.2.26 di bawah ini.



Tabel 3.2.27 Indeks Tukar Usaha Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, November 2018- Desember 2018 (2012=2010)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	November 2018	Desember 2018	
1. Tanaman Pangan	104,10	105,45	1,29
2. Hortikultura	106,80	109,20	2,24
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	105,46	104,51	-0,91
4. Peternakan	124,24	126,63	1,92
5. Perikanan	118,75	118,82	0,06
a. Perikanan Tangkap	129,34	129,24	-0,07
b. Perikanan Budidaya	102,50	102,81	0,30
NTUP Bali	111,40	112,83	1,29

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Prov. Bali Tahun 2018

Berdasarkan hasil pencatatan harga gabah di 7 kabupaten, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng selama bulan Desember 2018, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan sebesar 0,51 persen, dari Rp 4.706,33 per kilo gram pada bulan sebelumnya menjadi Rp 4.730,14 per kilo gram. Demikian pula, rata-rata harga GKP di tingkat penggilingan naik sebesar 0,56 persen dari Rp. 4.791,28 per kilo gram menjadi Rp 4.817,89 per kilo gram.

2.7.2 Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Peran sektor pertanian bagi provinsi Bali dalam pembangunan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat peranan sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB Bali, maka terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, PDRB dari sektor pertanian sebesar 15,11 persen, kemudian meningkat menjadi 14,73 persen pada tahun 2016 dengan tingkat capaian 138,96 persen sementara pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 14,05 persen dari target 11,10 persen dengan tingkat capaian 126,58 persen. Di tahun 2018 meningkat menjadi 14,50, Realisasi yang diacapai akhir RPJMD tahun 2018 125 persen.



Adapun permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian dalam perekonomian Bali antara lain :

1. Tingginya harga pupuk, ongkos tenaga kerja yang mahal, dan mahal nya alat-alat penunjang kinerja petani
2. Harga gabah yang tidak stabil, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, persediaan yang makin sempit, kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi, dan masalah kepemilikan lahan.

Solusi dari permasalahan diatas :

1. Pengembangan SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi)
2. Penyaluran dana LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) untuk pembelian gabah petani dan opkoop benih.
3. Sub sidi pupuk/pestisida serta bantuan sosial lainnya.

2.8 Berkurangnya Penduduk Miskin Dan Pengangguran

Visi Bali Mandara Jilid II sebagai konsepsi pembangunan, yang menjadi pijakan program pembangunan daerah Bali memasuki jilid kedua. Evaluasi tengah pula dilaksanakan dalam berbagai bentuk secara komprehensif, sehingga secara gamblang ditemukan berbagai keunggulan dan kelemahan program dan penjabarannya di lapangan.

Tabel 3.2.28 Berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian Akhir Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penduduk Miskin	n/a	2,8	3,91	71,61	2,8	71,61



2	Tingkat pengangguran terbuka	148,65	2,2	1,37	160,58	2,2	160,58
---	------------------------------	--------	-----	------	--------	-----	--------

2.8.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali

Setelah selama 10 tahun ke belakang, kemiskinan di Provinsi Bali selalu bertengger pada kisaran 5-4 persen. Untuk mewujudkannya tentunya diperlukan pemetaan karakteristik kemiskinan di Bali. Selain pemetaan, evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan juga penting, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau mungkin ditemukan formula yang lebih baik. Seperti seorang dokter hanya akan dapat mengobati pasiennya ketika telah melakukan suatu diagnosis yang tepat.

Beberapa konsep dan indikator kemiskinan dikembangkan dan diklasifikasikan sesuai jenis kemiskinan yang ada, di antaranya kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Namun, kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan suatu ukuran standar untuk mengukur kemiskinan dengan menggunakan sebuah batasan yang disebut garis kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan dibentuk oleh dua kelompok besar pengeluaran yaitu makanan dan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilogram kalori per kapita per bulan. Sedangkan garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk kebutuhan perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan per kapita per bulan. Berdasarkan standar tersebut, besarnya garis kemiskinan per September 2018 di Provinsi Bali adalah 388.452 rupiah/per kapita/bulan. Jadi, seseorang akan disebut miskin jika mempunyai penghasilan di bawah angka tersebut.



Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama tidak serta merta membuat Bali terbebas dari kemiskinan. Jika mengacu pada konsep kemiskinan di atas, dalam kurun waktu 20 tahun, terlihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Pada tahun 1999, tercatat angka kemiskinan di Provinsi Bali mencapai 8,53 persen. Angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 4,88 persen pada tahun 2010. Namun setelah periode tersebut, nyaris penurunan angka kemiskinan tidak banyak mengalami perubahan. Hingga bulan September 2018, angka kemiskinan Provinsi Bali masih tercatat 3,91 persen.

Beberapa kendala umum yang dijumpai dalam pengentasan kemiskinan di antaranya adanya pola pikir yang menganggap bahwa kemiskinan yang mereka alami bukanlah suatu masalah. Pola pikir tersebut memunculkan suatu agenda bagaimana mereka hidup bahagia di tengah belenggu kemiskinan dan bukannya berusaha untuk bisa keluar dari belenggu kemiskinan tersebut. Selain itu dengan tingkat kemiskinan yang cukup rendah, mengindikasikan bahwa kemiskinan yang ada saat ini sudah menyentuh lapisan kerak kemiskinan yang perlu penanganan khusus untuk mengentaskannya.

Program pengentasan kemiskinan yang pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya, seperti Simantri dalam bidang pertanian, Gerbangsadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu), program beasiswa untuk orang miskin serta dana desa dari pemerintah pusat, hampir seluruh program tersebut tujuan utamanya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dengan demikian, pendapatan mereka diharapkan bisa naik dan berada di atas garis kemiskinan sehingga mereka tidak lagi disebut miskin.

Di Pemerintahan yang baru, Pemerintah mengevaluasi program-program kemiskinan yang telah dijalankan selama ini. Dari sisi mekanisme penerimaan (receiving mechanism), pertama, perlu adanya kesadaran terhadap orang miskin. Sebab, pada dasarnya kemiskinan yang mengakar disebabkan karena adanya pola pikir atau mindset seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Penyadaran dimaksudkan sebagai upaya menanamkan kesadaran kritis tentang potensi yang dimiliki rakyat miskin untuk keluar dari

kemiskinan. Selain itu, kesadaran diharapkan akan dapat mengubah pemahaman mereka terhadap kemiskinan. Bahwa pada prinsipnya kemiskinan bukanlah nasib atau turunan namun kemiskinan sangat terkait dengan ketidaktahuan masyarakat miskin dalam menemukan solusi dan hambatan dalam hal mengakses sumber daya dalam rangka mengatasi kondisi kemiskinan yang dihadapinya.

2.8.2 Tingkat pengangguran terbuka



Gambar 3.5 Job Fair

yang menjanjikan baik bagi penduduk Bali maupun penduduk luar Bali. Meningkatnya jumlah penduduk tidak bisa lepas dari kenyataan tersebut, yang pada gilirannya membawa berbagai persoalan sosial ekonomi tersendiri, salah satunya masalah ketenagakerjaan.

Hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2018 menunjukkan adanya kenaikan jumlah angkatan kerja bila dibandingkan dengan Agustus 2017. Jumlah penduduk yang bekerja meningkat, sedangkan penduduk yang menganggur mengalami penurunan. Dari 3.288.908 penduduk usia kerja pada Agustus 2018, 2.525.355 orang tergolong sebagai Angkatan Kerja (penduduk usia kerja yang siap bekerja atau membuka usaha). Sejalan dengan itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2018 mencapai 76,78 persen. Dari Angkatan kerja hasil Sakernas Agustus 2018, penduduk yang bekerja/siap bekerja mencapai 2.490.970 orang (98,63 persen) dan penduduk



yang menganggur/membuka usaha mencapai 1,37 persen (34.485 orang). Sementara itu penduduk usia kerja tergolong sebagai Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumahtangga, dan kegiatan lainnya), hasil Sakernas Agustus 2018 mencapai 763.533 orang.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 naik sebesar 92.563 orang bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017 (mencapai 2.398.307 orang). Bila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada Februari 2018, penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar 94.073 orang (Februari 2018 mencapai 2.584.943 orang). Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2018 mencapai 1,37 persen mengalami penurunan sebesar 0,12 poin bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017 (mencapai 1,48 persen). Bila dibandingkan dengan Februari 2018 pengangguran di Bali mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin (Februari 2018 mencapai 0,86 persen).

Tabel 3.2.29

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2017-2018

Kegiatan Utama	2017	2018	
	Agustus	Februari	Agustus
1 Penduduk Usia Kerja	3.235.563	3.266.054	3.288.908
2 Angkatan Kerja	2.434.450	2.607.288	2.525.355
a. Bekerja	2.398.307	2.584.943	2.490.870
b. Menganggur	36.143	22.345	34.485
3 Bukan Angkatan Kerja	801.113	658.766	763.553
4 TPAK (%)	75,24	79,83	76,78
5 TPT (%)	1,48	0,86	1,37
6 Pekerja Tidak Penuh (<35 Jam)	550.541	606.812	583.676

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, 2018

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor- sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, pada Agustus 2018 penduduk Bali sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan



mobil dan sepeda motor, yang mencapai 20,16 persen (502.064 orang) dari total penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini mengalami kenaikan sebesar 3,40 persen dibandingkan Agustus 2017 (Agustus 2017 mencapai 485.573 orang).

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada Agustus 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,49 persen dibanding dengan Agustus 2017. Sektor ini masih memiliki peranan yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini terlihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mencapai 20,12 persen pada Agustus 2018 (501.235 orang) sedangkan pada Agustus 2017 mencapai 19,44 persen (466.307 orang).

Sektor Industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga memiliki peranan yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja. Penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan mencapai 364.683 orang (14,64 persen), sementara jumlah penduduk yang bekerja pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 318.574 orang (12,79 persen). Penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen dibandingkan dengan Agustus 2017 (Agustus 2017 mencapai 361.743 orang). Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan sebesar 7,88 persen dibandingkan dengan Agustus 2017 (Agustus 2017 mencapai 295.291 orang).

Meskipun sektor konstruksi termasuk dalam 5 sektor yang memberikan peranan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, namun pada Agustus 2018 sektor ini mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan kondisi Agustus 2017. Pada Agustus 2017 penduduk yang bekerja pada sektor konstruksi mencapai 179.134 orang sedangkan pada Agustus 2018 penduduk yang bekerja di sektor konstruksi mencapai 158.190 orang atau turun sebesar 11,69 persen. Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tersaji



Tabel 3.2.30
Penduduk 15 Tahun ke Atas Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2018

Lapangan Usaha	Agustus 2017	Februari 2018	Agustus 2018
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	466.307	469.721	501.235
B Pertambangan dan Penggalian	6.536	5.400	6.073
C Industri Pengolahan	361.743	440.296	364.685
D Pengadaan Listrik dan Gas	5.406	3.729	5.989
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.514	4.143	5.754
F Konstruksi	179.134	164.912	158.190
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	485.573	510.207	502.064
H Transportasi dan Pergudangan	66.654	57.602	72.194
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	295.291	342.651	318.574
J Informasi dan Komunikasi	10.429	15.438	7.566
K Jasa Keuangan dan Asuransi	58.175	64.622	60.987
L Real Estat	4.387	7.549	3.193
M,N Jasa Perusahaan	55.296	42.293	57.901
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	117.396	143.951	137.796
P Jasa Pendidikan	103.644	123.547	116.739
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47.892	55.930	50.097
R,S,T,U Jasa Lainnya	128.930	132.952	121.833
Jumlah	2.398.307	2.584.943	2.490.870

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, 2018

Permasalahan :

UMR dan UMP yang ditetapkan Pemerintah tidak sesuai dengan kondisi pembayaran di tempat bekerja.

Solusi :

Menetapkan upah minimum regional (UMR) dan upah minimum provinsi (UMP) sehingga mampu membangun kondisi ideal di kabupaten/kota serta memberikan pelatihan kerja dan pemagang.



2.9 Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Publik Yang Memadai, Ketersediaan Energi Dan Infrastruktur Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pencapaian prioritas Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat :

Tabel 3.2.31 Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian akhir tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang)	100,09	85,54	80,81	94,47	85,54	94,47
2	Persentase Pelayanan air minum	100	100	90,50	90,50	90	90,50

2.9.1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Baik Dan Sedang)

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 427,72 km, kondisi sedang 172,98 km dan kondisi rusak sepanjang 142,64 km. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2017, dimana Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 402,03 km, kondisi sedang 219,24 km dan kondisi rusak sepanjang 122,07 km.



Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 80,81 % atau sebesar 94,47 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 83,50 % dan realisasi sebesar 83,58 % dan capaian sebesar 100,9 %. Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada Renstra 2013-2018 sebesar 77,74% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 80,81% sehingga target pada Renstra telah terlampaui sebesar 3,07%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 21,6 Km dari APBD Murni dan sepanjang 1,60 Km dan Peningkatan Jembatan 10 M dari DAK dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Buleleng - Kubutambahan 6.00 Km di Kabupaten Buleleng;
2. Peningkatan Jalan Provinsi Pupuan - Pekutatan 4.00 Km di Kabupaten Buleleng;
3. Peningkatan Jalan Provinsi Wanagiri – Munduk – Mayong 3.00 Km di Kabupaten Buleleng;
4. Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Buruan – Batukaru 3.85 Km di Kabupaten Tabanan;
5. Peningkatan Jalan Provinsi Kedewatan - Payangan - Baturanyar 3.00 Km di Kabupaten Bangli;
6. Peningkatan Jalan Provinsi Jl. Merdeka 1.75 Km di Kabupaten Bangli;
7. Peningkatan Struktur Ruas Jalan Provinsi Pakseballi- Selat 1.60 Km (DAK) di Kabupaten Karangasem;
8. Peningkatan Jembatan Tukad Yeh Hon 10 M (DAK) di Kabupaten Tabanan;



Selain pekerjaan peningkatan jalan juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 13,87 Km dari APBD Murni dan sepanjang 3,14 Km dari DAK dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan - Seririt Sepanjang 5,50 Km;
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Antosari - Pupuan Sepanjang 4,00 Km;
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Rendang - Bts. Kota Amlapura Sepanjang 3,17 Km;
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jln. Bhayangkara - Bts. Kota Amlapura Sepanjang 1,20 Km;
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jln. Imam Bonjol, Jln. Teuku Umar - Bts. Kediri dan Bts. Kediri - Tanah Lot Sepanjang 2,00 Km.
6. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan - Seririt Sepanjang 2,03 km (DAK);
7. Pembuatan Jalan Inspeksi Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi;
8. Pemasangan Beton Kurus Pada Bahu Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi di 9 Kab/Kota;
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Padangbai - Silayukti Sepanjang 1,10 Km (DAK);
10. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Bts. Kota Semarapura - Sp. Klotok Sepanjang 2,04 Km (DAK);

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 64+500 dan Km. 73+400
2. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 67+000
3. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 66+500



4. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Petang - Sp. Kintamani Km. 36+150
5. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 57+000
6. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Rendang - Bts. Kota Amlapura Km. 55+200 dan Km. 70+400
7. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Surabrata - Blatungan - Kemoning Km. 64+400
8. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Bts. Kota Bangli - Nongan Km. 51+800 dan Km. 52+150
9. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+600
10. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Buruan - Senganan - Pacung Km. 48+000
11. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 62+700
12. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 52+600 dan Km. 53+100
13. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Tista - Lempuyang Km. 93+450
14. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Jln. Penataran Agung (Besakih) Km. 60+400
15. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 62+712
16. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kediri - Belayu - Mengwi Km. 22+800
17. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+607
18. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+593



19. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Paksewali - Selat Km. 53+075
20. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 37+000 (R) dan Km. 44+800 [R]
21. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+612
22. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 68+150 [R]
23. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 64+700 dan Km. 65+750
24. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Surabrata - Blatungan – Kemoning Km. 55+250 dan Km. 66+650
25. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Paksewali - Selat Km. 42+300 dan Km. 43+450
26. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penataran Agung Besakih Km. 60+415
27. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Buruan - Senganan - Pacung Km. 48+012
28. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 79+200 dan Km. 85+000
29. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Kayuambua Km. 43+450 dan Km. 43+550 [R]
30. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Kedewatan - Payangan - Baturanyar Km. 43+000 dan Km. 45+000
31. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Penelokan Km. 51+750 dan Km. 61+250
32. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 62+697



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah seringnya turun hujan mengakibatkan banyak terjadi longsor khususnya pada ruas jalan yang berada kawasan rawan longsor, sehingga diperlukan penanganan berupa Perkuatan Tebing dan saluran yang lokasinya tersebar diseluruh kabupaten di Provinsi Bali. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan berkala maupun peningkatan ruas-ruas jalan provinsi yang berdampak pada masih terdapatnya ruas-ruas jalan provinsi yang belum bisa tertangani secara maksimal.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2019 adalah melakukan pengawasan secara optimal dan memanfaatkan mandor-mandor jalan yang tersebar di seluruh kabupaten untuk lebih sigap dan cepat untuk menginformasikan apabila terjadi longsor pada ruas jalan provinsi, mengingat tingginya curah hujan yang terjadi yang sangat berdampak pada kondisi ruas jalan yang ada pada daerah-daerah rawan longsor. Penambahan anggaran dan penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya akan membuat segala permasalahan yang ada dapat tertangani lebih cepat dan baik.

2.9.2 Persentase Pelayanan air minum

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 87,00 %. Jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 4.214.956 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum sebanyak 3.551.943 orang. Tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali adalah sebesar 85,00 % atau sebesar 97,70 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 85,00% dan realisasi sebesar 76,56% sehingga capaiannya sebesar 90,07%, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.



2.10 Meningkatnya Lapangan Kerja, Ekspor, Komsumsi Ikan Per Kapita Dan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.2.32 Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat

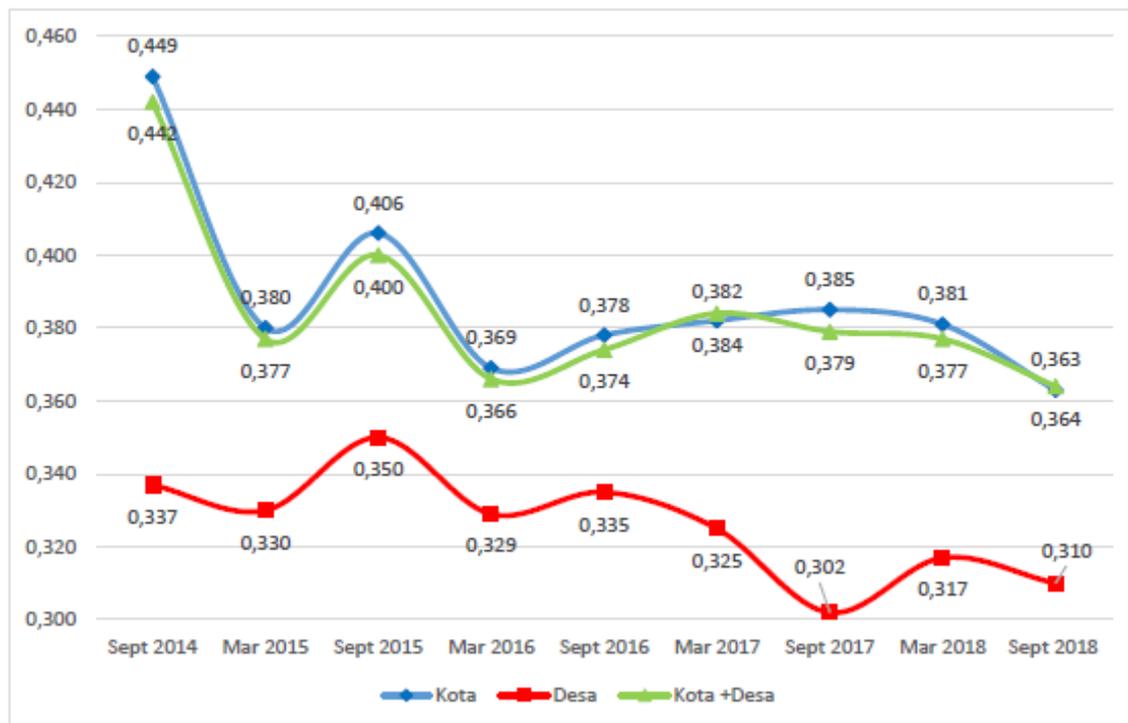
NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	2018			Target akhir tahun renstra 2018	Capaian akhir tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gini Ratio	88.54	0,360	0,377	104,72	0,360	104,72
2	Jumlah Pertumbuhan UMKM	100	500	500	100	500	100
3	Jumlah Koperasi Berprestasi	100	100	100	100	100	100
4	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	103,59	34,86	32,31	92,68	34,86	92,68
5	Nilai Ekspor	272,52	2,22	7,92	328.37	2,22	328.37

2.10.1 Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Provinsi Bali pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,377 dan turun menjadi 0,364 pada September 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,363, turun sebesar 0,018 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 yang tercatat sebesar 0,381. Untuk daerah perdesaan, *Gini Ratio* September 2018 tercatat sebesar 0,310, turun sebesar 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 yang tercatat sebesar 0,317. Gambar 2

menunjukkan perkembangan *Gini Ratio* di Bali pada periode September 2014 sampai dengan September 2018.

Grafik 3.10
Perkembangan *Gini Ratio* di Provinsi Bali
September 2014-September 2018



Sumber : Bappeda Litbang Provinsi Bali, tahun 2018

2.10.2 Jumlah Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM dari target 500 unit sudah terealisasi sebesar 500 unit atau 100 persen untuk Tahun 2018. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah mencapai 100 persen dari target akhir tahun Rentra. Dibandingkan pada tahun 2017 pertumbuhan UMKM adalah 500 unit UMKM, ini menunjukkan UMKM Provinsi Bali mengalami perkembangan yang sangat cepat, dengan jumlah penambahan unit koperasi sebesar 500 unit UMKM pertahun.

Faktor yang mendorong tumbuhnya wira usaha baru adalah adanya iklim usaha yang kondusif yang ditandai dengan adanya kebijakan Pemerintah



Provinsi Bali yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam membuka usaha baru. Disamping itu faktor keamanan Bali dan Bali sebagai tujuan wisata dunia juga memberikan andil yang sangat besar dalam menumbuhkan pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang

2.10.3 Jumlah Koprasi Berprestasi

Koprasi berprestasi merupakan koperasi yang berkualitas dan sehat. Penilaian koprasi berkualitas bertujuan untuk melihat performa dan mengukur kinerja koperasi. Beberapa faktor pendukung yang menjadi dasar adalah kelembagaan dan usahanya. Secara umum keadaan koperasi di Bali sudah memiliki kelembagaan yang kuat dan usahanya meningkat. Kondisi tersebut adalah sebagai keberhasilan dalam melakukan pembinaan-pembinaan yang optimal. Sedangkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi agar dalam pengelolaan keuangannya berjalan sesuai dengan aturan. Pada umumnya KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya menunjukkan kondisi yang sangat baik.

Jumlah koperasi berprestasi pada tahun 2017 adalah 100 unit, dibandingkan pada tahun 2018 jumlah koperasi berprestasi mengalami peningkatan sebesar 100 unit, dilihat dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 100 unit, sehingga capaian pada tahun 2018 mencapai 100 persen.

2.10.4 Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)

Ikan banyak mengandung zat-zat dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, mineral, asam amino, dan yang terpenting kandungan omega-3 yang bermanfaat bagi penyembuhan penyakit depresi, skizofrenia, dan gejala hipertensi pada anak-anak, peningkatan dan memasyarakatkan ikan harus terus didorong sebagai usaha untuk membentuk generasi bangsa yang sehat, kuat dan cerdas sebagai bagian dari program pemerintah untuk mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera.



Tingkat konsumsi ikan masyarakat Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 35,23 kilogram perkapita/tahun dibandingkan tingkat konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2018 mengalami persamaan dengan realisasi sama sebesar 32,31 kilogram perkapita/tahun dengan tingkat capaian 103,59 persen. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik dilihat dari target akhir rentra 2018 sebesar 34,86 kilogram perkapita/tahun atau capaian tahun 2017 terhadap 2018 mencapai 101,06 persen serta bila dibandingkan tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 33 kilogram perkapita/tahun Provinsi Bali masih lebih rendah.

2.10.5 Nilai Ekspor

Nilai ekspor barang Provinsi Bali yang dikirim lewat beberapa pelabuhan di Indonesia pada bulan September 2018 tercatat mencapai US\$ 47.585.032. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,92 persen dibandingkan nilai ekspor bulan Agustus 2018 (*m-to-m*) yang mencapai US\$ 44.094.384. Jika dibandingkan dengan bulan September 2017, nilai ekspor bulan September 2018 tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,84 persen.

Menurut negara tujuan ekspornya, peningkatan nilai ekspor dari bulan sebelumnya (*m-to-m*), dominan dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekspor tujuan Australia sebesar US\$ 746.230 atau naik sebesar 19,97 persen. Naiknya ekspor ke Australia didominasi oleh komoditas perhiasan/permata (terutama mutiara) yang tercatat hingga ratusan persen. Selain tujuan Australia, ekspor tujuan Amerika Serikat juga mengalami peningkatan sebesar 6,27 persen, atau secara absolut sebesar US\$ 741.496. Komoditas utama yang mempengaruhi peningkatan ekspor ke negara tersebut antara lain produk ikan dan udang mencapai 30,28 persen. Ekspor tujuan Tiongkok dan Singapura turut memberikan andil terhadap peningkatan nilai ekspor. Ekspor tujuan Tiongkok naik sebesar 25,48 persen yang didominasi oleh produk ikan dan udang. Sedangkan ekspor tujuan Singapura mengalami peningkatan sebesar 18,90 persen yang didominasi oleh produk perhiasan dan permata.



Jika dilihat menurut jenis komoditasnya, peningkatan nilai ekspor secara *month to month (m-to-m)* dominan dipengaruhi oleh naiknya nilai ekspor produk ikan dan udang sebesar US\$ 2.458.116. Peningkatan ekspor produk ini utamanya didominasi oleh naiknya ekspor tujuan Amerika Serikat yang tercatat sebesar US\$ 1.004.359. Selain itu, produk perhiasan/permata juga tercatat mengalami peningkatan sebesar US\$ 894.332 yang dominan dipengaruhi oleh naiknya ekspor produk ini ke Australia .

Tabel 3.2.32 Ekspor Provinsi Bali Menurut Negara Tujuan Keadaan bulan September 2017, Agustus 2018 dan September 2018

No.	Negara Tujuan	September 2017 (US\$)	Agustus 2018 (US\$)*	September 2018 **)		Perubahan (%)	
				Nilai (US\$)	%	Sep 2017 ke Sep 2018	Ags 2018 ke Sep 2018
1	AMERIKA SERIKAT	12 276 086	11 829 387	12 570 882	26,42	2,40	6,27
2	AUSTRALIA	5 725 465	3 736 732	4 482 962	9,42	-21,70	19,97
3	SINGAPURA	3 159 920	3 437 466	4 087 288	8,59	29,35	18,90
4	TIONGKOK	3 483 652	2 897 935	3 636 242	7,64	4,38	25,48
5	JEPANG	2 838 034	3 461 546	2 959 972	6,22	4,30	-14,49
6	HONGKONG	2 153 498	2 219 650	2 046 064	4,30	-4,99	-7,82
7	JERMAN	1 593 489	1 585 091	1 793 275	3,77	12,54	13,13
8	TAIWAN	734 422	1 082 275	1 671 090	3,51	127,54	54,41
9	THAILAND	898 578	1 171 723	1 437 251	3,02	59,95	22,66
10	PERANCIS	1 087 127	870 346	972 207	2,04	-10,57	11,70
11	LAINNYA	11 007 930	11 802 233	11 927 798	25,07	8,36	1,06
Total		44 958 201	44 094 384	47 585 032	100,00	5,84	7,92

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, 2018

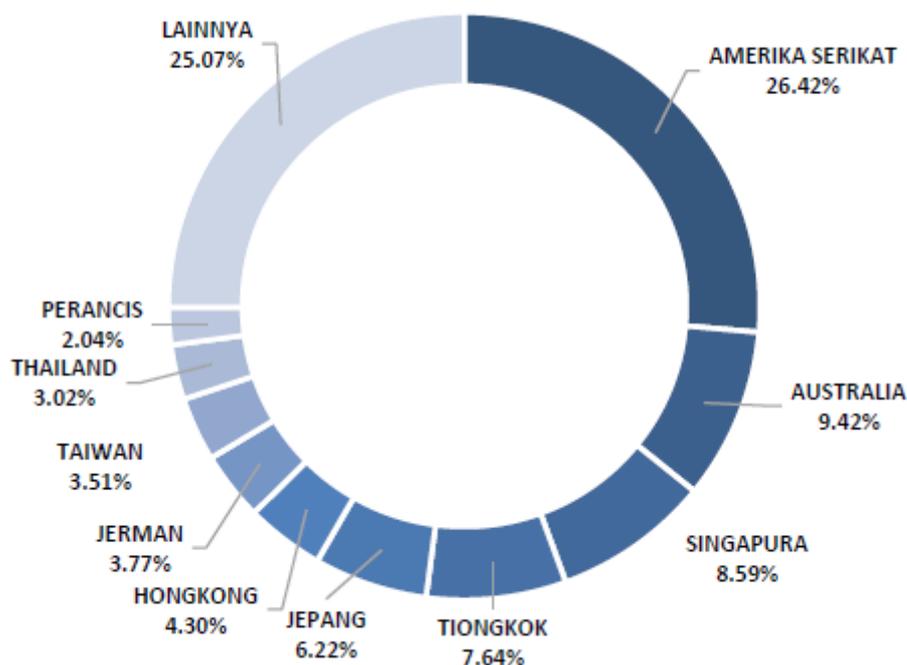
Dilihat dari sisi pangsa ekspor, sebagian besar ekspor pada bulan September 2018 ditujukan ke Amerika Serikat (26,42 persen), Australia (9,42 persen), Singapura (8,59 persen), Tiongkok (7,64 persen), Jepang (6,22 persen), Hongkong (4,30 persen), Jerman (3,77 persen), Taiwan (3,51 persen), Thailand (3,02 persen), Perancis (2,04 persen), dan sebanyak 25,07 persen diekspor ke negara lainnya. Nilai ekspor tujuan Taiwan mengalami peningkatan tertinggi mencapai 54,41 persen. Peningkatan ekspor tersebut dominan dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor produk ikan dan udang terutama jenis ikan cumi-cumi. Ekspor tujuan Tiongkok juga turut mengalami peningkatan sebesar 25,48 persen yang didominasi oleh produk ikan dan udang berupa cumi-cumi dan produk

buah-buahan berupa manggis. Pada bulan September 2018, dilakukan ekspor buah manggis dengan sistem tanpa melalui negara perantara, sehingga diduga akan membuka peluang ekspor komoditas tersebut lebih besar lagi. Kondisi penurunan ditunjukkan oleh ekspor tujuan Jepang (-14,49 persen) dan Hongkong (-7,82 persen).

Secara *year on year* persentase peningkatan ekspor tertinggi yaitu tujuan Taiwan hingga ratusan persen yang didominasi oleh produk ikan dan udang. Selain itu, ekspor ke Thailand juga meningkat sebesar 59,95 persen yang didominasi oleh ekspor produk mesin dan peralatan listrik.

Grafik 3.11

10 Negara Tujuan Utama Ekspor Provinsi Bali Keadaan Bulan September 2019.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Bali, 2018

Sepuluh komoditas utama yang diekspor pada bulan September 2018, yaitu produk ikan dan udang (29,75 persen), produk perhiasan/permata (14,92 persen), produk pakaian jadi bukan rajutan (9,97 persen), produk kayu, barang dari kayu (9,03 persen), produk perabot, penerangan rumah (6,57 persen),



produk barang-barang rajutan (3,97 persen), produk kertas/karton (2,25 persen), produk jerami / bahan anyaman (1,76 persen), produk kapas (1,73 persen), produk barang-barang dari kulit (1,57 persen) dan produk lainnya mencapai 18,47 persen. Dari sepuluh komoditas utama ekspor, bila dibandingkan bulan Agustus 2018 (*m-to-m*), enam jenis komoditas tercatat mengalami peningkatan dengan persentase peningkatan tertinggi sebesar 29,68 persen untuk produk kertas/karton yang peningkatan ekspornya dominan ke New Zealand. Selain produk tersebut, produk kapas juga mengalami peningkatan hingga 28,33 persen, yang didominasi oleh naiknya ekspor ke Amerika Serikat. Beberapa komoditas lain yang juga mengalami peningkatan ekspor secara *month to month* antara lain produk barang-barang rajutan (23,20 persen), produk ikan dan udang (21,01 persen), produk perhiasan/permata (14,41 persen), dan produk jerami/bahan anyaman (1,19 persen).

Selain beberapa komoditas ekspor yang mengalami peningkatan secara *month to month* komoditas mengalami penurunan ekspor antara lain produk barang-barang dari kulit (-24,06 persen), produk perabot, penerangan rumah (-5,69 persen), produk pakaian jadi bukan rajutan (-3,93 persen), dan produk kayu, barang dari kayu (-2,48 persen).

Tabel 3.2.33 Ekspor Provinsi Bali Menurut Komoditas Utama Keadaan bulan September 2017, Agustus 2018 dan September 2018

No.	Komoditas	September 2017 (US\$)	Agustus 2018 (US\$)*	September 2018 **)		Perubahan (%)	
				Nilai (US\$)	%	Sep 2017 ke Sep 2018	Ags 2018 ke Sep 2018
1	Ikan dan Udang (03)	11 089 497	11 700 807	14 158 923	29,75	27,68	21,01
2	Perhiasan / Permata (71)	7 245 837	6 207 078	7 101 410	14,92	-1,99	14,41
3	Pakaian Jadi Bukan Rajutan (62)	6 440 551	4 937 371	4 743 483	9,97	-26,35	-3,93
4	Kayu, Barang dari Kayu (44)	3 737 001	4 408 273	4 298 820	9,03	15,03	-2,48
5	Perabot, Penerangan Rumah (94)	2 808 430	3 314 942	3 126 367	6,57	11,32	-5,69
6	Barang-barang Rajutan (61)	1 271 501	1 531 892	1 887 323	3,97	48,43	23,20
7	Kertas / Karton (48)	424 132	824 305	1 068 989	2,25	152,04	29,68
8	Jerami / Bahan Anyaman (46)	820 426	829 081	838 952	1,76	2,26	1,19
9	Kapas (52)	803 430	641 890	823 759	1,73	2,53	28,33
10	Barang-barang dari Kulit (42)	811 382	983 948	747 194	1,57	-7,91	-24,06
11	Lainnya	9 506 016	8 714 796	8 789 812	18,47	-7,53	0,86
Total		44 958 201	44 094 384	47 585 032	100,00	5,84	7,92

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Bali, 2018



Distribusi ekspor 10 komoditas utama ke 10 negara utama tujuan terbesar pada bulan September 2018, dapat pula disimak pada Tabel 3. Dari sepuluh produk utama ekspor, tujuh di antaranya dominan ditujukan ke Amerika Serikat. Persentase produk-produk yang diekspor ke ikan dan udang (30,52 persen); pakaian jadi bukan rajutan (25,37 persen); kayu, barang dari kayu (22,04 persen); barang-barang rajutan (34,40 persen); kertas/karton (43,83 persen); jerami dan bahan anyaman (16,28 persen); dan kapas (89,06 persen). Sementara itu, produk perhiasan/permata paling banyak diekspor ke Singapura (29,52 persen), produk perabot, penerangan rumah paling banyak diekspor. Permasalahan untuk meningkatkannya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali adalah :

1. Memproduksi ikan laut dan tawar di Provinsi Bali mencapai 103.000 ton, potensi itu belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena masalah kebiasaan untuk mengkonsumsi belum terbentuk, masyarakat di Provinsi Bali lebih banyak bersinggungan dengan daging seperti ketika melakukan kegiatan adat.
2. Biaya ekspor dari Provinsi Bali masih sangat mahal ini disebabkan karena pelabuhan ekspor di Provinsi Bali kurang cukup memadai, pengusaha ekspor di Bali mengrim barang yang akan di ekspor melalui pelabuhan di luar provinsi bali seperti di pelabuhan di Surabaya Provinsi Jawa Timur dan melalui Jakarta.

Solusi :

1. Pemerintah Provinsi Bali membuat Program Gemrarikan untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi ikan, Gemrarikan telah dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berbagai lomba memasak serba ikan, lomba membuat sate lilit, lomba membuat lawar ikan, gebyar membakar sate ikan dan pembagian paket olahan ikan kepada masyarakat. Serta berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi ikan di seluruh Sekolah Dasar di Provinsi Bali.



2. Diupayakan Pemerintah Provinsi Bali akan membangun pelabuhan internasional di Kabupaten Buleleng.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali tahun 2018 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018, kinerja Pemerintah Provinsi Bali termasuk kategori baik. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan di antara masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dari data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali ini, terlihat bahwa realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2018 telah berada pada jalur yang benar (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2013-2018. Capaian kinerja indikator-indikator bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemiskinan sudah berada di atas capaian nasional.



Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KETERANGAN PENJELASAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern	Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, Iptek dan daya saing SDM serta kesehatan masyarakat	Angka Melek Huruf	Penduduk usia diatas 15 tahun keatas yang melek huruf di bagi dengan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di kali 100%	Disdikpora
				Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Disdikpora
				Index Pembangunan Manusia (IPM)	Hasil Perhitungan BPS	Bappeda, Disdikpora,Dinkes
				Angka usia harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur	Dinkes
				Tingkat Pengangguran terbuka	Jumlah Penganggur Dibanding Dengan Jumlah Angkatan Kerja	Disnaker
				Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang lulus Uji Kompetensi	Disnaker

1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya	Jumlah Penciptaan Seni Kreasi Baru /Eksperimental		Dinas Kebudayaan
			Terwujudnya pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya	Biro Organisasi
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti		Inspektorat
				Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dispenda

1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan (Hasil Penilaian Ombudsmen)		Biro Organisasi
2	Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman	Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung. Pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkat toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional	Terwujudnya pengaturan tata ruang dan meningkatkan pelestarian lingkungan alam	Persentase ruang terbuka hijau per luas wilayah Kabupaten/Kota	Luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah Kabupaten/Kota	Satpol PP, BLH, PU, Bappeda
				Status pencemaran baku mutu air	Mengacu kepada Pergub Baku Mutu Air	BLH
				Persentase penurunan emisi GRK		BLH

1	2	3	4	5	6	7
			Terwujudnya pengendalian pertumbuhan penduduk, toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta sistem keamanan yang berstandar internasional	Rasio angka kriminalitas	Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk di kali 10.000	Kesbangpol, Satpoll PP
				Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi		Satpol PP, BLH, PU, Bappeda
			CEK GARIS	Total Fertility Rate (TFR)	Hasil Perhitungan BPS	Dinkes

1	2	3	4	5	6	7
3	Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin	Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik.	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	<p>Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)</p> <p>Lama tinggal wisatawan mancanegara</p> <p>Rata -rata jumlah pengeluaran wisatawan selama di Bali</p> <p>Persentase kontribusi pariwisata terhadap PDRB</p>	<p>Jumlah wisatawan yang berkunjung dalam satu tahun</p> <p>Kontribusi PDRB sector pariwisata dibagi dengan Total PDRB dikali 100%</p>	<p>Dispar</p> <p>Dispar</p> <p>Dispar</p> <p>Dispar</p>

1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	Index yang diterima Petani di bagi dengan index yang di bayar petani dikalikan 100 %	Bappeda
				Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi PDRB sector pertanian dibagi dengan Total PDRB dikali 100%	Bappeda
			Berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	(100 - AngkaKemiskinan)	BPMPD, Bappeda, Dinakertrans, Disos
				Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%	Disnakertrans + UPT
			Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya dikalikan 100%	PU, Dishubinfokom

1	2	3	4	5	6	7
				Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di bagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100 %	Bappeda
			Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	Kesenjangan pendapatan antar masyarakat	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan
				Pertumbuhan Ekonomi	PDRB tahun ini dikurangi PDRB tahun lalu dibagi dengan PDRB tahun lalu dikali 100%	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan,
				Jumlah Pertumbuhan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
				Jumlah Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang memperoleh Penghargaan Koperasi Berprestasi (Koperasi yang sehat dan berkualitas)	Dinas Koperasi
				Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)		Dinas Kelautan dan Perikanan
				Nilai Ekspor		Disperindag, Perikanan, Perkebunan, Pertanian

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI BALI TAHUN 2018**

NO.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, lptek dan daya saing SDM serta kesehatan masyarakat	1	Angka Melek Huruf	90,42%	92,98%	103,53
		2	Angka rata-rata lama sekolah	8,11%	n/a	n/a
		3	Index Pembangunan Manusia (IPM)	74,47%	n/a	n/a
		4	Angka usia harapan hidup	71,51%	n/a	n/a
		5	Tingkat Pengangguran terbuka	2,2%	1,37%	62,27
		6	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi Kompetensi	170	170	100
2	Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya	1	Jumlah Penciptaan Seni Kreasi Baru /Eksperimental	70	92	124,28
3	Terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance)	1	Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali	76	77,05	101,40
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	95%	100	105
		3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100	103,79	103,79
4	Terwujudnya pengaturan tata ruang dan meningkatkan pelestarian lingkungan alam	1	Persentase ruang terbuka hijau per luas wilayah Kabupaten/Kota	21%	n/a	n/a
		2	Status pencemaran baku mutu air	15,70%	12.25%	100
		3	Persentase penurunan emisi GRK	2%	2%	100
5	Terwujudnya pengendalian pertumbuhan penduduk, toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta sistem keamanan yang berstandar internasional	1	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	n/a	n/a	n/a

		2	Total Fertility Rate (TFR)	100	100	100
6	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	4.600.000	6.027.159	131.02
7	Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	1	Nilai Tukar Petani (NTP)	119,27	103,87	87,18
		2	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	11,60	14,50	125
8	Berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran	1	Persentase penduduk miskin	2,8	3,91	71,61
		2	Tingkat pengangguran terbuka	2,2	1,37	160,58
9	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	1	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	85,54	80,81	94,47
		2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	100	90,50	90,50
10	Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	1	Gini Ratio	0,360	0,377	104,72
		2	Pertumbuhan Ekonomi	500	500	100
		3	Jumlah Koperasi Berprestasi	100	100	100
		4	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	34,86	32,31	92,68
		5	Nilai Ekspor	2,22	7,92	328.37

**PERJANJIAN KINERJA PROVINSI BALI
TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, lptek dan daya saing SDM serta kesehatan masyarakat	Angka Melek Huruf	90,17%
	Angka rata-rata lama sekolah	8,11%
	Index Pembangunan Manusia (IPM)	73,44%
	Angka usia harapan hidup	71,51%
	Tingkat Pengangguran terbuka	1,89%
	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi Kompetensi	150
Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Warisan Budaya	Jumlah Penciptaan Seni Kreasi Baru /Eksperimental	70
Terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance)	Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Bali	75
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	90%
	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100%
	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan (Hasil Penilaian Ombudsmen)	25 unit
Terwujudnya pengaturan tata ruang dan meningkatkan pelestarian lingkungan alam	Persentase ruang terbuka hijau per luas wilayah Kabupaten/Kota	n/a
	Status pencemaran baku mutu air	12,25%
	Persentase penurunan emisi GRK	9.15%
Terwujudnya pengendalian pertumbuhan penduduk, toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta sistem keamanan yang berstandar internasional	Rasio angka kriminalitas	n/a
	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	100
	Total Fertility Rate (TFR)	2,0
Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	4.400.000

1	2	3
Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,93%
	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	11,10
Berkurangnya penduduk miskin dan pengangguran	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	n/a
	Tingkat pengangguran terbuka	2,2
Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik	83,58
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	n/a
Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	0,340
	Jumlah Pertumbuhan UMKM	500
	Jumlah Koperasi Berprestasi	100 unit
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	34,01
	Nilai Ekspor	2,22

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran

Visi : "Bali Mandara Jilid 2", Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
1	Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern	Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	98.60	97.21	98.65	92.70	99.00	97.24	97,20		97.25	
			Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82.90	86.85	83.00	86.91	84.05	84.87	84.50		84.70	
			Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	66.00	76.13	67.00	75.64	68.00	69.45	69.00		70.00	
				Angka Melek Huruf	89.42	92.56	89.67	94.67	89.92	94.89	90.17		90.42	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Angka rata-rata lama sekolah	8.87	8.11	9.12	8.11	9.37	8.11	8.11		8.11	
				Index Pembangunan Manusia (IPM)	74,46-74,67	72.48	74,91-75,22	73.27	75,35-75,75	73,27	72,98-73,44		74,03 - 74,47	
				Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Angka Kelulusan SMP/MTs	99,73%	99,61%	99,95%	99,82%	99,95%	99,99%	99,95%		99,95%	
				Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,95%	99,97%	99,95%	99,82%	99,95%	99,99%	99,95%		99,95%	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan (%) JKBM pada penduduk sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
				Angka usia harapan hidup	70,80 - 70,84	71.19	71,09 - 71,14	71.35	71,51 - 71,58	n/a	71,51 - 71,58		71,51 - 71,58	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Balita gizi buruk	1.5%	96 bayi	1.4%	99 bayi	1.3%	102 bayi	1.2%		1.2%	
				Jumlah ruang rawat inap kelas III	731	731	1031	1031	1331	1331	1331		1331	
				Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari balita gizi buruk yang dijumpai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Persen KLB (Kejadian Luar Biasa) yang tertangani < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan	Proporsi anggota DPRD perempuan	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%		30%	
			Meningkatnya peran gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47%	46.53%	50%	49.25%	53%	52,78%	52,78%%		52,78%%	
				Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
			Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase subak yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Persentase desa pekraman yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Persentase kerjasama pembinaan dengan banjar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Bali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Persentase kerjasama dengan majelis desa pekraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	120	54	125	60	130	8	135		135	
				Jumlah pembinaan politik daerah	80	160	85	160	90	90	95		95	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
			Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Bali	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		20%	
				Jumlah Unit Pelayanan yang telah menerapkan prinsip pelayanan prima	15	15	16	16	17	17	18		19	
2	Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman	Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional	Terwujudnya pengaturan tata ruang	Perda Rencana Tata Ruang Provinsi	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah		1 Wilayah	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	22%	18%	22%	20%	24%	21%	21%		21%	
				Perda Zonasi pemanfaatan ruang	20%	20%	40%	40%	60%	60%	60%		60%	
			Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)	2.2	2.2	2.2	2.1	2,1	2.1	2.0		2.0	
				Persentase current user pemakai kontrasepsi modern	60,68%	83.59%	61,76%	84.12%	62,84%	80.48%	63,92%		65,00%	
				Persentase penanganan sampah	70.00%	68,00%	72.00%	70,00%	76.00%	75,00%	75,00%		75,00%	
			Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku	Pencemaran status mutu air sungai utama	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik		baik	
				Persentase Penduduk berakses air minum yang terlindungi	70.00	65.00	75.00	75.00	80.00	78.00	78.00		78.00	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Jumlah sumber daya lahan dan air yang dilindungi	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 4 sungai, 18 sumber mata air)	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 4 sungai, 18 sumber mata air)	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 4 sungai, 18 sumber mata air)	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 4 sungai, 18 sumber mata air)	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 4 sungai, 18 sumber mata air)	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 4 sungai, 18 sumber mata air)	Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 5 sungai, 18 sumber mata air)		Perlindungan (1 danau, 1 waduk, 5 sungai, 30 sumber mata air)	
			Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali	Jumlah pengawasan pelanggaran pemanfaatan ruang	18 Kawasan	18 Kawasan	18 Kawasan	18 Kawasan	18 Kawasan	18 Kawasan	18 Kawasan		18 Kawasan	
				Jumlah lokasi penyelenggaraan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, flora dan fauna	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali, dan 1 unit arboritum	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali, dan 1 unit arboritum	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali	40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali		40 penangkar, 10 LK/PPS, pasar flora dan fauna (satwa) di 9 Kabupaten/Kota di Bali	
				Persentase peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi PB	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		20%	
			Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional	Jumlah pelaksanaan Operasi Gabungan	600 Kali	600 Kali	600 Kali	600 Kali	600 Kali	600 Kali	600 Kali		600 Kali	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Jumlah Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pendd)	15	3.7	14	4.04	13	13.96	13.96		13.96	
			Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama	Jumlah Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan konflik adat	20%	470	20%	653	20%	555	300		300	
				Persentase penurunan jumlah demo	80%	37%	60%	7%	40%	25%	20%		20%	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran										
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		
3	Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin	Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	3.4 Juta	3.7 Juta	3.7 Juta	4 Juta	4.1 Juta	4.9 Juta	4.4 Juta		4.4 Juta		
				Pengembangan daerah tujuan wisata	9 DTW	11 DTW	10 DTW	11 DTW	11 DTW	11 DTW	11DTW		11 DTW		
				Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	6.6 Juta	6.3 Juta	7.0 Juta	7.1 Juta	7.5 Juta	8.1 Juta	8.1 Juta		8.1 Juta	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Nilai Tukar Petani (NPT)	110.19	110.19	112.39	112.39	114.64	114.64	114.64		114.64	
				Pertumbuhan PDRB	6,08 - 6,73	6,73	6,44 - 7,13	6,04	6,83 - 7,56	6,26	6,3 - 6,7		6,6 - 7,2	
				Jumlah UMKM (tumbuhnya UMKM baru sebanyak 2500 buah dalam lima tahun)	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah		500 Buah	
			Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh	PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th)	26,36 - 28,58	38,1	29,37 - 30,05	42,66	33,26 - 34,34	33,26 - 34,34	37,67 - 39,24		43,04 - 45,11	
				Persentase peningkatan akurasi data investadi PMA dan PMDN serta kemitrasahaan antara pengusaha sedang dan besar dengan UMKM	20	20	20	20	20	20	20	20		20
			Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi	Persentase peningkatan minat investor berinvestasi di Bali	20	20	20	20	20	20	20		20	
				Jumlah nasabah jamkrida	6000.00	8000.00	7000.00	14679.00	8000.00	8000.00	9000.00		10000.00	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
			Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi (sebanyak 750 buah selama lima tahun)	150 Buah	150 Buah	150 Buah	150 Buah	150 Buah	150 Buah	150 Buah		150 Buah	
				Persentase peningkatan nilai ekspor per tahun	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22		2.22	
			Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi	Jumlah koperasi berkualitas melalui pemeringkatan oleh lembaga independen sebanyak 500 buah selama lima tahun	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah		100 Buah	
			Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	Persentase penduduk miskin	3,90 - 3,82	4,75 %	3,86 - 3,78	5,25 %	3,83 - 3,75	4,15 %	3,2 - 3,0		2,8 - 2,6	
				Tingkat pengangguran terbuka	1,95 - 2,01	1,90	1,96 - 2,00	1,99	1,88 - 1,96	1,89	2,3 - 2,2		2,2 - 2,1	
				Persentase/jumlah rumah yang sudah dibedah pertahun	2500 Unit	1,537 Unit	3350 Unit	1,488 Unit	3350 Unit	1,495 Unit	1,500 Unit		1,500 Unit	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
			Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Persentase pelayanan air minum	60.00%	60.00%	65.00%	65.00%	68.00%	68.00%	73.00%		85.00%	
				Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi baik	83.54%	82,64%	85.82%	84.24%	88.39%	82,72%	82,72%		82,72%	
				Indeks Gini Ratio	0,367 - 0,356	0.4150	0,346-0,333	0.3768	0,325-0,310	0.377	0,340-0,360		0,330- 0,350	
				Peningkatan Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita (Jiwa)	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	5,000,000	5,000,000	5,500,000		7,000,000	
				Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali	Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	9.7%	16.44	10.2%	15.11	10.6%	14.73	11.1%		11.6%
				Nilai Tukar Petani (NPT)	110.19	106	112.39	104.54	114.64	107.06	116.93		119.27	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran										
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		
				Jumlah Binaan Gapoktan Simantri	525	502	650	549	800	632	900		1000		
				Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), dan koordinasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan di 9 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
				Jumlah Binaan Gapoktan Simantri	525	502	650	549	800	632	900		1000		
				Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian	Produksi komoditas andalan a.l : kopi arabika, kopi robusta, kakao, jambu mente, cengkeh, kelapa, tembakau (ton)	104,905	104,905	105,205	105,205	105,526	105,526	106,038		106,456	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran									
					2014		2015		2016		2017 *		2018 *	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
				Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan peningkatan pertanian dan kelautan dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan	Produksi Perikanan (ton)	423,822	423,822	432,296	432,296	440,912	440,912	449,760		458755.2	
			Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	31.46	31.46	32.31	32.31	33.16	33.16	34.01		34.86	
				Tingkat pengangguran terbuka	1,95 - 2,01	1,90	1,96 - 2,00	1,99	1,88 - 1,96	1,89	2,3 - 2,2		2,2 - 2,0	